

**SKRIPSI**

**DAMPAK PENYALURAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN FAKIR  
MISKIN DI KABUPATEN PIDIE DALAM PERSPEKTIF  
PEMBERDAYAAN EKONOMI ISLAM**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD RYANDA  
NIM. 220602058**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2026 M/1447 H**

**SKRIPSI**

**DAMPAK PENYALURAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN FAKIR  
MISKIN DI KABUPATEN PIDIE DALAM PERSPEKTIF  
PEMBERDAYAAN EKONOMI ISLAM**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD RYANDA  
NIM. 220602058**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2026 M/1447**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ryanda

NIM : 220602058

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Februari 2026

Yang menyatakan



Muhammad Ryanda

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**DAMPAK PENYALURAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
FAKIR MISKIN DI KABUPATEN PIDIE DALAM PERSPEKTIF  
PEMBERDAYAAN EKONOMI ISLAM**

Disusun Oleh:

Muhammad Ryanda  
NIM: 220602058

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam  
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Intan Quratulaini, S.Ag, M.S.I  
NIP. 197612172009122001

Husnul Mirzal, S.H., M.SEI  
NIP. 199606032025051006

Mengetahui, Ketua Prodi,

Dr. Intan Quratulaini, S.Ag, M.S.I  
NIP. 197612172009122001

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**DAMPAK PENYALURAN BANTUAN PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN FAKIR MISKIN DI KABUPATEN PIDIE  
DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN  
EKONOMI ISLAM**

Muhammad Ryanda

NIM: 220602058

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam  
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu 04 Februari 2026

14 Sya'ban 1447

Banda Aceh,  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Intan Ouratulaini, S.Ag., M.S.I  
NIP: 197612172009122001

Husnul Mirzal, S.H., M.SEI  
NIP: 199606032025051006

Penguji I

Penguji II

Muksal, S.E.I., M.E.I

NIP: 199009022020121008

Cut Elfida, S.HI., M.A

NIP: 198912122023212076

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

NIP: 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web; [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Ryanda  
NIM : 220602058  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : 220602058@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir       KRU       Skripsi

yang berjudul:

**Dampak Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Fakir Miskin Di Kabupaten Pidie Dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Islam**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Aceh Besar  
Pada tanggal : 06 Februari 2026

Mengetahui,

Penulis

  
Muhammad Ryanda  
NIM: 220602058

Pembimbing I

  
Dr. Hitan Quratulaini, S.Ag, M.S.I  
NIP: 197612172009122001

Pembimbing II

  
Husnul Mirza, S.H, M.SEI  
NIP: 199606032025051006

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Dampak Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Fakir Miskin Di Kabupaten Pidie Dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Islam”**. Shalawat beriring salam tidak lupa tecurahkan kepada junjungan alam Baginda Rasulullah SAW yang telah menghantarkan umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dan mencapai derajat Strata 1 Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Ar-Raniry. Penulis menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan proposal tugas akhir ini. Besar harapan penulis akan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis juga menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

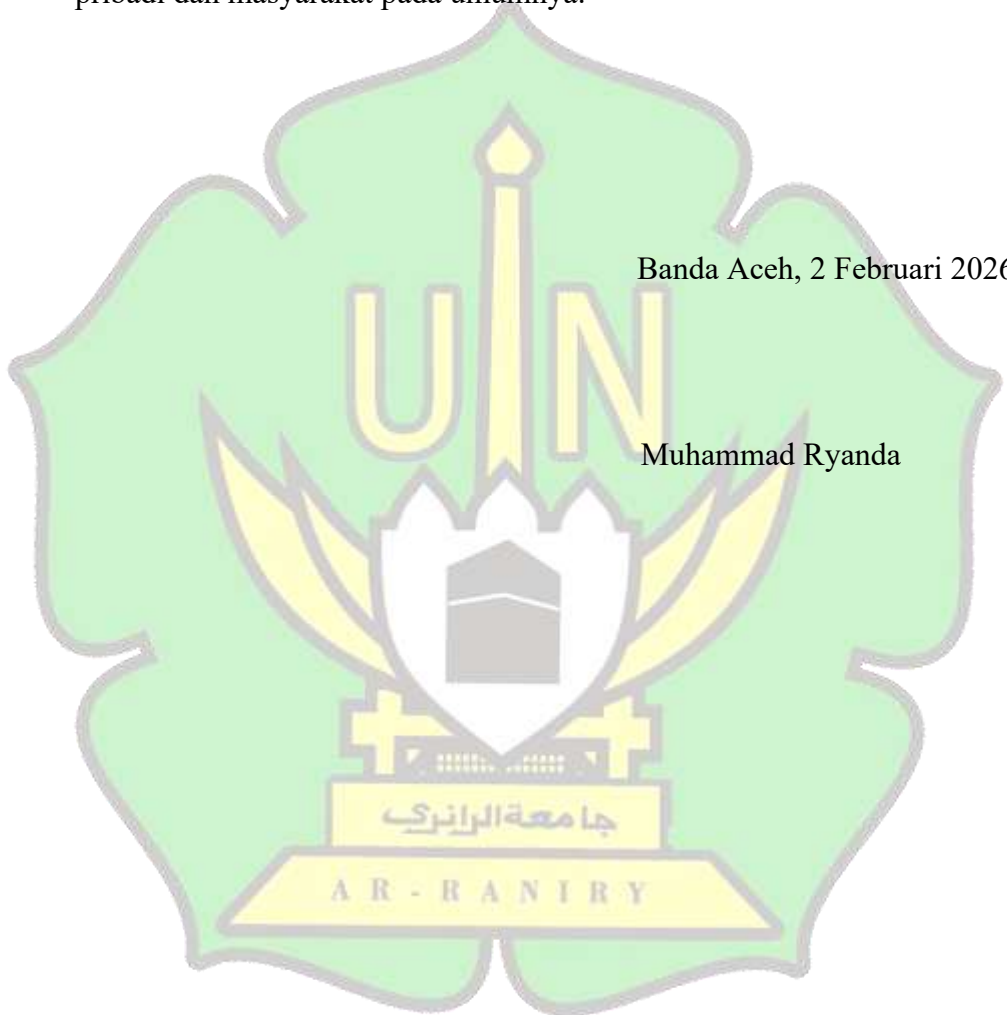
1. Bapak Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Intan Quratulaini, S.Ag, M.S.I selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sekaligus sebagai pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Muksal, S.E.I., M.E.I selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Husnul Mirzal, S.H., M.SEI selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dukungan serta motivasi yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Penasehat Akademik (PA) Ibu Junia Farma, M.Ag serta seluruh dosen-dosen dan para staf pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar Raniry Banda Aceh.
7. Bapak Muksal, S.E.I., M.E.I dan Ibu Cut Elfida, S.HI., M.A sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
8. Orang tua tercinta, Bapak H. Ibnu Khatab, S.Sos dan Ibu Hj. Rosliana, S,sos. Terima kasih Bapak dan Ibu yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, motivasi tanpa henti kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.
9. Irna Muliani, A.Md.Keb, Irwan Fajri, A.Md.Kom, Khairul Munandar, A.Md.KL, Muhajjir, A.Md.T, terima kasih kakak dan abang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi tiada henti kepada penulis.
10. Pak Irwansyah putra, Pak Adiawan, Pak Mahrizal, Ibu Cut Sulastri, Ibu Iryani, Ibu Samsiar, Kak Ernita, Ibu Suryati, dan Ibu Yusliana sebagai informan pada penelitian ini. Terima kasih sebesar-besarnya yang telah memberi saya nasehat semangat juang agar saya mampu menyelesaikan studi pada akademik ini.
11. Serta terima kasih pula pada Kak Ziaurrahmah, Fathan Mufadhal, dan teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak menyumbangkan pikiran, dukungan, saran dan masukan dalam

menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 2 Februari 2026

Muhammad Ryanda



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun  
1987 –Nomor: 0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
		Tidak			
1	ا	dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـيْ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َـوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كيف

*Haula* : هول

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

*qāla* : قَالَ  
*ramā* : رَمَى  
*qīla* : قِيلَ  
*yaqūlu* : يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfāl/ raudatulatfāl:*

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah/:*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*Ṭalḥah:*

طَلْحَةٌ

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Ryanda  
NIM : 220602058  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Dampak Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Fakir Miskin Di Kabupaten Pidie Dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Islam  
Pembimbing I : Dr. Intan Quratulaini, S.Ag, M.S.I  
Pembimbing II : Husnul Mirzal, S.H., M.SEI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) serta menganalisis dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan fakir miskin di Kabupaten Pidie dalam perspektif pemberdayaan ekonomi Islam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie serta pentingnya evaluasi efektivitas program bantuan sosial tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari sisi nilai-nilai keislaman yang hidup dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pihak Dinas Sosial Kabupaten Pidie, pendamping PKH, serta beberapa keluarga penerima manfaat (KPM). Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran PKH di Kabupaten Pidie telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, mulai dari tahap pendataan, verifikasi, penetapan KPM, hingga penyaluran bantuan secara non-tunai.

Pendampingan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman KPM mengenai pengelolaan keuangan dan pentingnya pendidikan serta kesehatan. Dampak penyaluran PKH terhadap kesejahteraan fakir miskin terlihat dari berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga, meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta adanya upaya sebagian KPM dalam memanfaatkan bantuan untuk kegiatan produktif. Dalam perspektif pemberdayaan ekonomi Islam, PKH sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial terhadap kelompok lemah (mustadh'afin). Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan bantuan secara produktif dan peningkatan kemandirian ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendampingan berbasis nilai-nilai Islam agar PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Program Keluarga Harapan (PKH), kesejahteraan fakir miskin, pemberdayaan ekonomi Islam, bantuan sosial, Kabupaten Pidie.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETEJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	8
1.3    Tujuan Penelitian .....	9
1.4    Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1    Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2    Manfaat Praktis.....	10
1.4.3    Manfaat Kebijakan .....	10
1.5    Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1    Program Keluarga Harapan (PKH).....	12
2.1.1    Pengertian PKH.....	12
2.1.2    Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) .....	13

2.1.3	Potensi Program Keluarga Harapan (PKH).....	13
2.1.4	Tantangan Program Keluarga Harapan (PKH).....	14
2.1.5	Kriteria Penerima Manfaat PKH .....	14
2.1.6	Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH .....	15
2.1.7	Besaran Bantuan PKH.....	18
2.1.8	Alur Pelaksanaan PKH .....	21
2.2	Proses Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin .....	27
2.3	Kesejahteraan .....	28
2.3.1	Pengertian Kesejahteraan .....	28
2.3.2	Indikator Kesejahteraan .....	30
	Kategori Desil / Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.....	31
2.3.3	Kesejahteraan Ekonomi Fakir Miskin .....	34
2.3.4	Peran P2K2 dalam Program Keluarga Harapan (PKH).....	35
2.4	Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Islam .....	36
2.4.1	Kesejahteraan dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Islam ..	37
2.4.2	Nilai-Nilai Pemberdayaan Ekonomi Islam.....	39
2.5	Keterkaitan Antara PKH dengan Kesejahteraan.....	41
2.5	Penelitian Terkait.....	42
2.6	Kerangka Berpikir.....	46
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>		<b>48</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	49
3.2	Lokasi Penelitian.....	49
3.3	Sumber Data .....	49
3.4	Teknik Penentuan Informan.....	52
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.5.1	Observasi .....	53
3.5.2	Wawancara .....	54
3.5.3	Dokumentasi.....	54
3.6	Subjek dan Informan Penelitian.....	55

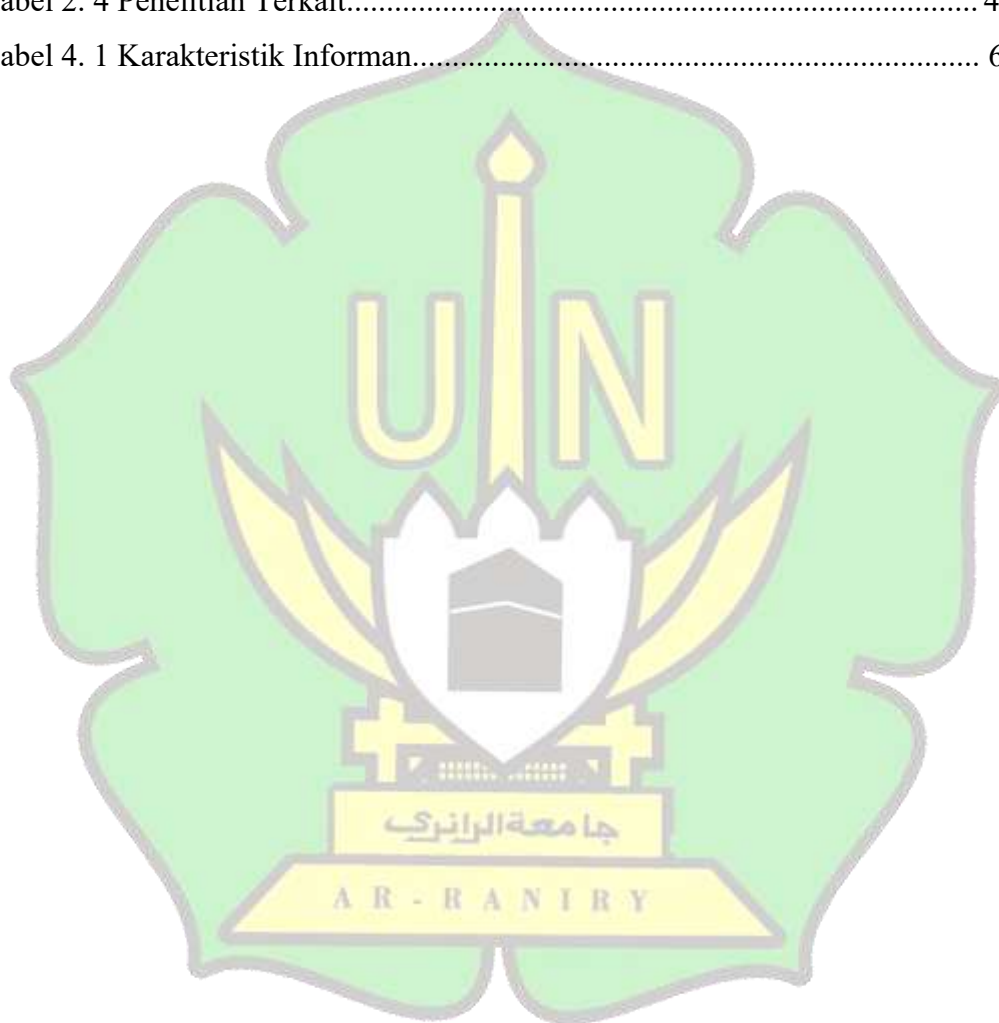
3.7	Metode Anilisis Data .....	55
3.7.1	Reduksi Data .....	56
3.7.2	Penyajian Data .....	56
3.7.3	Penarikan Kesimpulan .....	57
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>58</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	58
4.1.1	Profil Kabupaten Pidie .....	58
4.1.2	Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Pidie .....	59
4.1.3	Karakteristik Informan .....	61
4.2	Pelaksanaan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie .....	65
4.2.1	Proses Penetapan dan Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH .....	65
4.2.2	Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) .....	67
4.2.3	Pendampingan dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) .....	70
4.3	Dampak Penyaluran PKH terhadap Kesejahteraan Ekonomi Fakir Miskin .....	72
4.3.1	Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar .....	72
4.3.2	Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pendapatan dan Aktivitas Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) .....	76
4.3.3	Perubahan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Indikator Kesejahteraan .....	78
4.4	PKH dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Islam .....	80
4.4.1	Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Pelaksanaan PKH .....	80
4.4.2	PKH sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	82
4.4.3	Pandangan Fakir Miskin terhadap PKH dalam Perspektif Islam .....	83
4.5	Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan PKH di Kabupaten Pidie .....	86

4.5.1	Hambatan Administratif dan Teknis dalam Pelaksanaan PKH di Kabupaten Pidie .....	86
4.5.2	Hambatan Sosial dan Kultural dalam Pelaksanaan PKH di Kabupaten Pidie .....	88
4.6	Pembahasan Hasil Penelitian .....	90
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>94</b>
5.1	Kesimpulan .....	94
5.1.1	Pelaksanaan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie .....	94
5.1.2	Dampak Penyaluran PKH terhadap Kesejahteraan Fakir Miskin di Kabupaten Pidie .....	95
5.2	Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>97</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>104</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kriteria Penerima Manfaat PKH .....	15
Tabel 2. 2 Besaran Bantuan PKH.....	18
Tabel 2. 3 Kategori Desil / Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.....	31
Tabel 2. 4 Penelitian Terkait.....	42
Tabel 4. 1 Karakteristik Informan.....	61



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir ..... 46



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menghambat proses pembangunan, ditandai oleh berbagai keterbatasan, ketidakmampuan, dan kekurangan yang signifikan. Contohnya meliputi keterbatasan dalam mencapai kebebasan yang diinginkan dalam hidup, ketidakmampuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai, serta kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian dan makanan (Saragi *et al.*, 2021). Keterbatasan komunitas dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka biasanya disebabkan oleh keterbatasan peluang usaha dan pekerjaan, kurangnya keterampilan dan pengetahuan, serta perlindungan tenaga kerja yang tidak memadai.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh 2025, perkembangan jumlah penduduk miskin di Aceh menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dalam periode Maret 2020 hingga Maret 2025. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 814,91 ribu jiwa atau setara dengan 14,99 persen dari total penduduk. Angka ini kemudian mengalami peningkatan pada September 2020 menjadi 833,91 ribu jiwa (15,43 persen), yang diduga kuat dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tren peningkatan masih berlanjut hingga September 2021 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 850,26 ribu jiwa atau 15,53 persen. Memasuki tahun 2022, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 menjadi 806,82 ribu jiwa (14,64 persen), meskipun kembali mengalami kenaikan ringan pada September 2022. Selanjutnya, pada periode 2023 hingga 2025, angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun secara lebih konsisten. Pada

Maret 2023 jumlah penduduk miskin tercatat 806,75 ribu jiwa (14,45 persen), menurun menjadi 804,53 ribu jiwa (14,23 persen) pada Maret 2024, dan mengalami penurunan yang lebih signifikan pada September 2024 menjadi 718,96 ribu jiwa (12,64 persen). Penurunan ini berlanjut hingga Maret 2025, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 704,69 ribu jiwa atau 12,33 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbaikan bertahap dalam kesejahteraan masyarakat Aceh, yang tidak terlepas dari peran berbagai program perlindungan sosial dan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah.

Menurut Badan Pusat Statistik Aceh (BPS 2024), pada tahun 2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pidie tercatat sekitar 19,23%, dan angka tersebut sedikit meningkat menjadi 19,59% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi penurunan yang sedikit lebih signifikan yaitu menjadi 18,79%, dan data hingga tahun 2023 menunjukkan persentase miskin tetap stabil di 18,78%. Sementara pada tahun 2024, data jumlah penduduk miskin di Pidie mencapai 86,89 ribu jiwa, dengan persentase penduduk miskin sebesar 18,59%. Hal ini menunjukkan tren penurunan kecil dibandingkan periode sebelumnya. Data-data tersebut mencerminkan bahwa meskipun angka kemiskinan di Pidie mulai menurun sejak 2021, penurunan relatif lambat dan masih berada pada kisaran hampir sepertiga dari total populasi.

Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh kawasan pedesaan dengan struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil masyarakat. Kondisi geografis dan karakteristik sosial ekonomi tersebut menjadikan Kabupaten Pidie rentan terhadap permasalahan kemiskinan, khususnya pada kelompok masyarakat fakir miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pendapatan tidak tetap, minimnya

kesempatan kerja yang berkelanjutan, serta keterbatasan modal usaha menjadi faktor yang turut memperkuat kerentanan ekonomi rumah tangga miskin di daerah ini. Oleh karena itu, kemiskinan di Kabupaten Pidie tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga sebagai kondisi multidimensional yang mencakup rendahnya kualitas hidup dan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak.

Kabupaten Pidie dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan cukup signifikan, khususnya pada kelompok fakir miskin yang bergantung pada sektor informal dan bantuan sosial pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie tergolong relatif tinggi dan penurunannya berlangsung secara bertahap, sehingga memerlukan evaluasi terhadap efektivitas program perlindungan sosial yang telah dijalankan (BPS Kabupaten Pidie, 2023). Selain itu, karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang didominasi oleh pendapatan rendah, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta ketergantungan pada sektor pertanian menjadikan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin. Pemilihan Kabupaten Pidie juga relevan dengan fokus penelitian ini yang mengkaji dampak penyaluran PKH dalam perspektif pemberdayaan ekonomi Islam, mengingat Aceh merupakan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, sehingga memungkinkan analisis program bantuan sosial tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari sisi keadilan, kemaslahatan, dan upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Dinas Sosial memegang peranan yang sangat krusial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial

masyarakat. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di tingkat daerah, Dinas Sosial memiliki tugas dalam melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkolaborasi dengan aparat desa, pendamping PKH, dan elemen masyarakat untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan (Permatasari, 2024). Selain itu, Dinas Sosial juga berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan PKH di tingkat kabupaten/kota, yang mengatur jadwal penyaluran, melakukan sinkronisasi data dengan Kementerian Sosial, serta menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan penyalur, seperti bank Himbara, agar proses distribusi bantuan dapat berlangsung dengan lancar dan transparan (Azizah & Prathama, 2024).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia, khususnya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH memberikan bantuan sosial bersyarat berupa transfer tunai langsung kepada keluarga yang memenuhi kriteria kemiskinan yang ketat. Bantuan ini tidak hanya sekedar memberikan dukungan finansial, tetapi juga mengharuskan penerima untuk memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin (Sofianto, 2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran yang lebih luas daripada sekedar memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga yang kurang mampu. Program ini juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi rumah tangga bagi para penerima manfaat. Melalui bantuan tunai bersyarat dan kegiatan pendampingan, PKH mendorong keluarga miskin untuk mencapai kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

Bantuan finansial yang disalurkan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berfungsi sebagai modal awal bagi penerima manfaat untuk mengembangkan usaha mikro, seperti berdagang, beternak, dan kegiatan produktif lainnya. Dalam konteks pemberdayaan, PKH juga memfasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), di mana peserta memperoleh pelatihan mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga, literasi keuangan, kewirausahaan sederhana, serta strategi pengembangan usaha berbasis keluarga. Upaya ini terbukti mampu mendorong perubahan perilaku penerima bantuan dari ketergantungan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan (Latane *et al.*, 2023). Selain itu, PKH juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan produktif dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, PKH tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi bagi keluarga miskin.

Fakir miskin merupakan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi serba kekurangan, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan secara layak. Mereka umumnya bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah untuk bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bentuk bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan fokus utama untuk menghentikan siklus kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial. Bantuan ini dimanfaatkan oleh keluarga miskin untuk meringankan beban pengeluaran rumah

tangga sekaligus meningkatkan penghasilan mereka, di mana melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), penerima manfaat mendapat pengetahuan mengenai perawatan anak, strategi membangun usaha untuk menambah pendapatan, dan pengelolaan keuangan rumah tangga. Dalam hal pemberdayaan ekonomi, PKH tidak sekadar berperan sebagai bantuan konsumsi, melainkan sebagai alat pemberdayaan yang mendorong perubahan perilaku dan kemandirian ekonomi keluarga penerima melalui pendampingan mendalam serta edukasi finansial, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka sekaligus membuka kesempatan berwirausaha produktif yang akhirnya mampu meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin secara lestari (Yasin & Aris, 2023).

Dalam ranah pemberdayaan ekonomi, nilai-nilai Islam menyediakan fondasi etika yang kokoh, yang mampu meningkatkan motivasi serta rasa tanggung jawab sosial baik pada tingkat individu maupun kelompok masyarakat. Prinsip-prinsip utama seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*mizan*), dan kebajikan (*ihsan*) memiliki peran krusial dalam memastikan keberhasilan inisiatif bantuan sosial, sehingga tidak terbatas pada dimensi amal semata. Pendekatan yang berfokus pada elemen spiritual dipercaya dapat memotivasi penerima bantuan agar lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang diterima. Penelitian oleh Ainulyaqin *et al.* (2023) menyatakan bahwa penggabungan nilai-nilai Islam ke dalam program sosial dapat memperkuat dampak pemberdayaan serta ketahanan ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini menggaris bawahi bahwa efektivitas program seperti PKH tidak semata-mata bergantung pada jumlah bantuan yang disalurkan, melainkan juga pada kerangka nilai yang mendukungnya. Karenanya, esensial untuk menelusuri

tingkat internalisasi nilai-nilai tersebut dalam implementasi PKH di Kabupaten Pidie.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membuktikan adanya keterkaitan antara nilai-nilai Islam dengan peningkatan keberhasilan program-program sosial. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Hidayatingsih dan Sofa (2025) di Desa Dawuhan mengungkap bahwa integrasi pendidikan karakter berbasis Islam dalam Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil mempererat solidaritas sosial serta meningkatkan etika moral di kalangan penerima manfaat. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan keislaman tidak hanya memperkuat aspek spiritual, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan kapasitas sosial dan ekonomi keluarga.

Salah satu kekurangan yang masih teridentifikasi dalam berbagai studi sebelumnya adalah minimnya perhatian terhadap aspek keislaman saat mengevaluasi keefektifan program bantuan sosial pemerintah. Kebanyakan penelitian hanya menitikberatkan pada elemen teknis, administratif, dan ekonomi, tanpa mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai agama, terutama nilai-nilai Islam, mempengaruhi keberhasilan program tersebut di kalangan masyarakat. Padahal, di wilayah seperti Aceh yang memiliki tradisi religius yang mendalam, nilai-nilai keislaman sering berperan sebagai panduan utama dalam membentuk pola perilaku sosial dan ekonomi penerima bantuan (Fitrayani, 2025). Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie dalam kerangka sosial-keagamaan masyarakat lokal.

Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan keterkaitan erat dengan inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat kurang mampu. Sebagai skema bantuan sosial yang bersifat kondisional, PKH tidak sekadar berperan sebagai langkah intervensi ekonomi sementara, melainkan juga sebagai strategi untuk memberdayakan kelompok miskin guna keluar dari lingkaran

kemiskinan. Dengan memberikan bantuan uang secara rutin, penerima manfaat seperti dukungan modal usaha, investasi produktif, serta bimbingan ekonomi dapat mengalokasikan dana tersebut untuk memperluas kegiatan bisnis kecil, memperkuat stabilitas finansial keluarga, dan menaikkan penghasilan rumah tangga. Oleh karena itu, PKH tidak hanya berkontribusi pada penyediaan kebutuhan pokok, tetapi juga berfungsi sebagai alat utama dalam mendorong otonomi ekonomi masyarakat miskin (Kamariani *et al.*, 2024), Program ini juga mendorong pemahaman mengenai pentingnya manajemen keuangan dan pengembangan kemampuan pribadi sebagai investasi masa depan (Zahran, 2025).

Di tengah masyarakat Aceh yang didasari oleh nilai-nilai Islam, implementasi PKH sejalan dengan prinsip pemberdayaan Islam yang menekankan keadilan sosial, kemakmuran umat, dan tanggung jawab terhadap kelompok lemah. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk meneliti bagaimana penerapan PKH di Kabupaten Pidie serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi kelompok miskin, sambil mempertimbangkan aspek keislaman sebagai elemen penting dalam efektivitas program tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan dan masalah yang telah dikemukakan di atas peneliti tertarik mengambil penelitian karya ilmiah ini dengan judul "**Dampak Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Fakir Miskin Di Kabupaten Pidie Dalam Pemberdayaan Islam**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan fakir miskin di Kabupaten Pidie?

2. Bagaimana dampak penyaluran PKH terhadap kesejahteraan fakir miskin di Kabupaten Pidie?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie.
2. Untuk menganalisis dampak penyaluran PKH terhadap kesejahteraan fakir miskin di Kabupaten Pidie.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian ekonomi Islam dan ilmu kesejahteraan sosial. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memperkaya literatur akademik mengenai pengaruh bantuan sosial bersyarat seperti PKH terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dari perspektif nilai-nilai Islam. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar pengembangan teori-teori pemberdayaan masyarakat berbasis spiritual dan kultural lokal, yang selama ini masih terbatas dalam konteks program pemerintah. Selain itu, penelitian ini memperkuat pentingnya integrasi pendekatan religius dalam praktik kebijakan sosial, terutama di daerah dengan karakteristik religius seperti Aceh. Dengan demikian, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan model evaluasi program bantuan sosial dalam perspektif multidimensional ekonomi, sosial, dan spiritual.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi pihak pelaksana Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pidie, khususnya Dinas Sosial, mengenai efektivitas program dari sudut pandang penerima manfaat. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyempurnakan strategi pelaksanaan PKH agar lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal dan keislaman masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini dapat membantu para pendamping PKH dalam mengembangkan pendekatan pemberdayaan yang lebih humanis dan berbasis nilai, bukan sekadar administratif. Penelitian ini juga bermanfaat bagi organisasi masyarakat sipil dan lembaga keagamaan dalam membangun sinergi dengan pemerintah untuk mendampingi penerima manfaat secara spiritual dan ekonomi. Dengan informasi yang diperoleh, masyarakat penerima juga diharapkan dapat lebih sadar akan potensi kemandirian mereka pasca penerimaan bantuan.

#### **1.4.3 Manfaat Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional, khususnya dalam merancang kebijakan bantuan sosial yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam program kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah dengan mayoritas penduduk Muslim. Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendorong pembaruan regulasi mengenai pelatihan pendamping PKH agar lebih responsif terhadap karakteristik sosial budaya dan religius masyarakat lokal. Dengan pendekatan berbasis nilai seperti ini, kebijakan pemberdayaan sosial diharapkan dapat menjadi lebih inklusif, efektif, dan berdampak jangka panjang.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan penyusunan kajian secara terstruktur, penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab satu, pendahuluan. Pada Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua, Landasan Teori. Pada Bab ini membahas teori-teori yang relevan seperti teori kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan sistem sosial, ditambah ulasan dari berbagai penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian.

Bab tiga Metode Penelitian. Pada Bab ini menguraikan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik penentuan informan, metode pengumpulan data, teknik analisis data, serta cara untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh.

Bab empat, Hasil dan Pembahasan. Pada Bab ini menyajikan hasil temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dibahas secara mendalam dengan mengaitkan pada teori maupun temuan studi sebelumnya. Fokusnya pada pelaksanaan program, hambatan yang ada, persepsi penerima, dan strategi optimalisasi.

Bab lima, Penutup. Pada Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diajukan untuk pengambil kebijakan dan peneliti berikutnya. Bab ini juga memuat keterbatasan studi yang dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Program Keluarga Harapan (PKH)**

##### **2.1.1 Pengertian PKH**

Program Harapan Keluarga (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH. Sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia mulai menerapkan program ini pada tahun 2007. Program Perlindungan Sosial ini, yang secara internasional dikenal sebagai Transfer Tunai Bersyarat (CCT), telah terbukti efektif dalam menangani masalah kemiskinan, terutama kemiskinan kronis, di berbagai negara (Kemensos, 2025).

Program bantuan sosial bersyarat seperti PKH memberikan akses mudah bagi keluarga kurang mampu, terutama ibu hamil dan anak-anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan (faskes) dan fasilitas pendidikan (fasdik) di lingkungan mereka. Selain itu, manfaat PKH kini telah diperluas untuk mencakup penyandang disabilitas dan lansia, dengan tujuan menjaga kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan ketentuan konstitusi dan visi Nawacita Presiden Republik Indonesia. Program bantuan sosial bersyarat seperti PKH memberikan akses mudah bagi keluarga kurang mampu, terutama ibu hamil dan anak-anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan di lingkungan mereka. Selain itu, manfaat PKH kini telah diperluas untuk mencakup penyandang disabilitas dan lansia, dengan tujuan menjaga kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan ketentuan konstitusi dan visi Nawacita Presiden Republik Indonesia (Kemensos, 2025).

### **2.1.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang tidak mendukung kesejahteraan komunitas termiskin. Program ini dirancang dengan filosofi bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga terkait dengan rendahnya akses terhadap layanan dasar dan perilaku yang kurang produktif. PKH memiliki lima sasaran khusus yang saling berkaitan (Kemensos, 2025):

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan kesehatan dan pendidikan
2. Mengurangi tekanan pengeluaran sambil meningkatkan pendapatan melalui bantuan tunai dan pemberdayaan ekonomi
3. Mendorong perubahan perilaku positif dan kemandirian individu dengan persyaratan kesehatan dan pendidikan
4. Mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengakses layanan dasar
5. Memperkenalkan manfaat penggunaan produk dan layanan keuangan formal melalui mekanisme non-tunai

### **2.1.3 Potensi Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki berbagai potensi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi fakir miskin. Bantuan yang diberikan melalui PKH mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Dengan berkurangnya beban pengeluaran tersebut, keluarga penerima manfaat memiliki peluang yang lebih besar untuk mengalokasikan sumber daya yang

dimiliki bagi kebutuhan lain yang bersifat produktif. Selain itu, PKH juga membuka akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Apabila dikelola secara optimal, bantuan PKH berpotensi dimanfaatkan sebagai modal awal usaha kecil yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin (Kementerian Sosial RI, 2022; BPS, 2023).

#### **2.1.4 Tantangan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Meskipun memiliki potensi yang besar, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) juga menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan jumlah bantuan yang diterima sering kali belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi keluarga fakir miskin, sehingga dampak ekonomi yang dihasilkan masih bersifat terbatas. Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan keluarga penerima manfaat menyebabkan bantuan yang diterima cenderung digunakan untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek dan belum dimanfaatkan secara produktif. Tantangan lainnya adalah permasalahan ketepatan sasaran dalam pendataan penerima bantuan, yang berpotensi menimbulkan ketidaktepatan penyaluran dan mengurangi efektivitas program dalam mengentaskan kemiskinan. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PKH sangat bergantung pada kualitas pendampingan, pengawasan, serta pembinaan yang berkelanjutan kepada keluarga penerima manfaat (Suharto, 2021).

#### **2.1.5 Kriteria Penerima Manfaat PKH**

Keluarga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria ditetapkan dalam keputusan. Menurut PERMENSOS No 1 tahun 2018 sasaran PKH adalah keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu

program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Untuk lebih jelas peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Kriteria Penerima Manfaat PKH**

<b>Peserta KPM PKH</b>		
<b>No</b>	<b>Nama Komponen</b>	<b>Kriteria</b>
1.	Kesehatan	Ibu hamil, ibu nifas dan anak usia 0-6 tahun
2.	Pendidikan	Anak sekolah usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun.
3.	Kesejahteraan Sosial	Disabilitas dan LANSIA usia 60 tahun ke atas

Sumber: PERMENSOS no.1 tahun 2018

Dari data pada tabel 2. 1 bahwa peserta PKH adalah keluarga penerima tunjangan sosial PKH yang telah memenuhi semua syarat atau kriteria yaitu pada komponen kesehatan meliputi ibu hamil/ nifas/ dan anak dibawah 5 tahun dari 0 sampai 6 tahun, pendidikan komponennya adalah siswa berusia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, dan komponen kesejahteraan sosial yaitu memiliki anggota keluarga yang disabilitas dan orang yang berusia 60 tahun ke atas.

### **2.1.6 Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH**

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Kementerian Sosial (KEMENSOS, 2021). Hak-hak Keluarga Penerima Manfaat meliputi penerimaan

bantuan sosial PKH, bantuan sosial dari program PKH, dan akses terhadap layanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Selain itu, mereka juga berhak atas program bantuan tambahan yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sementara itu, kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH, dijelaskan pada PERMENSOS No 1 Tahun 2018 sebagai berikut:

A. Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan Sosial PKH.
- b. Pendampingan PKH.
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- d. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

B. Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas berat.

C. (1) Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:

- a. Kesehatan
- b. Pendidikan
- c. Kesejahteraan sosial

(2) Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan petugas pelayanan kesehatan dan kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas.
- b. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan petugas pelayanan kesehatan dan kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif
- c. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.

(3) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

(4) Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:

- a. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun.

- b. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat. Pasal 9 (1) Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

### 2.1.7 Besaran Bantuan PKH

Adapun besaran bantuan PKH menurut KEMENSOS 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Besaran Bantuan PKH**

No	Kategori	Indek/Tahun (Rp.)	Indeks/3 bulan (Rp.)	Indeks/2 bulan (Rp.)	Indeks/bulan (Rp.)
1.	Ibu Hamil	3.000.000	750.000	500.000	250.000
2.	Anak usia 0 sd 6 tahun	3.000.000	750.000	500.000	250.000
3.	Anak Sekolah SD	900.000	225.000	150.000	75.000
4.	Anak Sekolah SLTP	1.500.000	375.000	250.000	125.000

No	Kategori	Indek/Tahun (Rp.)	Indeks/3 bulan (Rp.)	Indeks/2 bulan (Rp.)	Indeks/bulan (Rp.)
5.	Anak Sekolah SLTA	2.000.000	500.000	333.333	166.666
6.	Disabilitas berat	2.400.000	600.000	400.000	200.000
7.	Lanjut Usia 60 tahun ke atas	2.400.000	600.000	400.000	200.000
8.	Korban Pelanggaran HAM Berat	10.800.000	2.700.000	1.800.000	900.000

Sumber: Kemensos 2024

Menurut data dari tabel besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (KEMENSOS) untuk tahun 2024, nilai bantuan disediakan secara bertahap berdasarkan kategori penerima manfaat dan keperluan spesifik setiap rumah tangga miskin. Program ini secara utama bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM), khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Untuk kategori ibu hamil dan anak berusia 0–6 tahun, masing-masing mendapatkan bantuan tahunan sebesar Rp3.000.000, yang bisa dicairkan dalam jumlah Rp750.000 setiap tiga bulan, Rp500.000 setiap dua bulan, atau Rp250.000 per bulan. Bantuan tersebut ditujukan untuk

membantu pemenuhan nutrisi ibu dan anak, serta memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang cukup selama periode kehamilan dan perkembangan anak.

Selain itu, bagi anak yang sedang bersekolah, jumlah bantuan disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Anak Sekolah Dasar (SD) menerima bantuan Rp900.000 per tahun, Sekolah Menengah Pertama (SLTP) Rp1.500.000 per tahun, dan Sekolah Menengah Atas (SLTA) Rp2.000.000 per tahun. Bantuan ini dimaksudkan untuk menunjang kelangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mengurangi risiko putus sekolah karena kendala finansial. Adapun kategori penyandang disabilitas berat dan orang lanjut usia (lansia) berusia 60 tahun ke atas masing-masing memperoleh bantuan Rp2.400.000 per tahun, yang setara dengan Rp600.000 setiap tiga bulan, Rp400.000 setiap dua bulan, atau Rp200.000 per bulan. Bantuan ini diberikan sebagai upaya perlindungan sosial untuk memungkinkan kelompok rentan memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kategori terakhir, yaitu korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, mendapat bantuan dengan nilai paling tinggi, yakni Rp10.800.000 per tahun, atau Rp2.700.000 setiap tiga bulan, Rp1.800.000 setiap dua bulan, dan Rp900.000 per bulan. Besaran ini disesuaikan dengan situasi khusus penerima yang menghadapi dampak sosial dan ekonomi signifikan akibat pelanggaran HAM masa lalu. Secara umum, skema besaran bantuan PKH tahun 2024 menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan yang seimbang sesuai dengan tingkat kerentanan sosial masyarakat. Bantuan ini tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan juga bertujuan untuk memberdayakan keluarga miskin agar dapat mandiri dan meningkatkan taraf hidup melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan ekonomi.

### 2.1.8 Alur Pelaksanaan PKH

Proses pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahapan, tahapan tersebut dapat dilihat pada skema alur pelaksanaan PKH. Berikut alur pelaksanaan PKH (Kemensos, 2021: 26):

#### 1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah proses penentuan wilayah cakupan dan jumlah keluarga calon penerima manfaat (KPM). Data mengenai jumlah calon penerima manfaat diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penetapan calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga di Kementerian Sosial Republik Indonesia.

#### 2. Pertemuan Awal dan Validasi

Pada tahap ini, fasilitator PKH bertugas memberikan pemahaman kepada calon KPM tentang program PKH sekaligus melakukan validasi data. Validasi bertujuan untuk memastikan bahwa data awal calon penerima manfaat sesuai dengan data terbaru sehingga memenuhi kriteria PKH. Data awal diperoleh melalui aplikasi e-PKH, yang digunakan dalam proses validasi. Sebelum mengadakan pertemuan awal, fasilitator PKH harus menyiapkan beberapa hal, termasuk:

- a. Menentukan lokasi pertemuan yang tepat bersama dengan kepala kecamatan atau kepala desa.
- b. Mengundang pejabat desa, serta pihak-pihak terkait di bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Membagikan undangan kepada calon KPM sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA).
- d. Menyiapkan persyaratan lain yang diperlukan.

Setelah persiapan selesai, pada pertemuan awal, fasilitator akan memberikan informasi mengenai tujuan PKH, persyaratan untuk menjadi KPM, data yang diperlukan untuk membuka rekening bank, serta membahas sanksi dan rekomendasi jika KPM tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, fasilitator akan menjelaskan mekanisme pengaduan, hak dan kewajiban KPM, jadwal distribusi bantuan, komitmen terhadap komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta penjelasan tentang distribusi bantuan sosial PKH. Setelah sesi informasi, data calon peserta yang hadir akan diverifikasi. Bagi calon peserta yang tidak dapat hadir, fasilitator akan melakukan kunjungan langsung ke rumah mereka. Fasilitator juga harus melengkapi data peserta untuk membuka rekening bank guna distribusi bantuan sosial. Verifikasi data harus setidaknya mematuhi prinsip Know Your Customer (KYC).

### 3. Tahap Penentuan PKH KPM

Data dari verifikasi dan pembaruan calon KPM yang memenuhi kriteria partisipasi akan ditentukan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Selain itu, calon dengan rekening aktif akan secara resmi ditetapkan sebagai PKH KPM melalui Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

### 4. Penyaluran Bantuan Sosial

- a. Bantuan sosial PKH disalurkan dalam bentuk tunai kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima berdasarkan keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.
- b. Distribusi bantuan dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

- c. Sistem distribusi bantuan sosial PKH menggunakan mekanisme non-tunai, yang dapat disalurkan melalui Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS) atau buku tabungan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Pembukaan rekening penerima bantuan sosial dilakukan secara terpusat dan kolektif berdasarkan data yang diterima oleh bank penyalur dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
  - 2) Bersamaan dengan pembukaan rekening, buku tabungan, KKS, dan PIN Mailers dicetak.
  - 3) Sosialisasi dan pendidikan mengenai bantuan sosial non-tunai dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerja sama dengan bank penyalur dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - 4) Penyaluran KKS kepada KPM dilakukan oleh bank penyalur berkoordinasi dengan Kantor Layanan Sosial Daerah, termasuk penyerahan buku tabungan, KKS, dan PIN Mailers.
  - 5) Penyaluran bantuan dilakukan oleh bank penyalur dengan mentransfer dana dari penyedia dana ke penerima.
  - 6) Penarikan dana bansos dapat dilakukan melalui ATM, cabang bank, agen bank, atau e-warung.
  - 7) Rekonsiliasi hasil penyaluran merupakan proses pengecekan dan pencocokan administrasi yang dilakukan melalui aplikasi e-PKH oleh SDM PKH setelah KPM menerima bantuan. SDM PKH juga memberikan informasi terkait pencairan dana dan alasan jika pencairan tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan.

- 8) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bantuan sosial dilakukan oleh staf PKH Kementerian Sosial, praktisi PKH setempat, dan bank penyalur untuk memastikan bantuan diterima oleh KPM.
- 9) Bantuan sosial yang diterima dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha, dan kebutuhan lain yang mendukung pencapaian tujuan PKH.

#### 5. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data bertujuan untuk memverifikasi status terkini peserta PKH karena data tersebut menjadi dasar program perlindungan sosial. Data ini juga penting untuk proses informasi, penyaluran, dan penghentian bantuan sosial kepada KPM. Beberapa perubahan informasi yang dapat terjadi pada KPM meliputi:

- a. Transformasi status eligibilitas KPM.
- b. Perubahan nama pengurus akibat kematian, perceraian, tuntutan pidana, atau gangguan ingatan.
- c. Perubahan komponen KPM.
- d. Perubahan layanan kesehatan yang digunakan.
- e. Perubahan layanan pendidikan yang digunakan.
- f. Perpindahan alamat KPM.
- g. Perubahan data pengurus dan anggota keluarga sesuai data kependudukan.
- h. Perubahan data bantuan program komplementer.
- i. Perubahan kondisi kesejahteraan sosial ekonomi.

Entri data pemutakhiran dilakukan oleh pendamping melalui aplikasi e-PKH setiap kali ditemukan perubahan kesejahteraan KPM pada

kunjungan. Hasil pemutakhiran dikirimkan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.

#### 6. Verifikasi Komitmen

- a. Kewajiban KPM PKH terkait pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial mengharuskan seluruh anggota KPM terdaftar, terlibat, dan memiliki akses terhadap layanan tersebut.
- b. Verifikasi kepesertaan bertujuan memastikan seluruh KPM telah terdaftar dan memiliki akses yang teratur sesuai protokol layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- c. Entri data verifikasi bulanan dilakukan melalui aplikasi e-PKH untuk mencatat kehadiran KPM pada setiap kunjungan layanan oleh pendamping PKH.
- d. Hasil verifikasi menjadi dasar dalam penyaluran, penangguhan, maupun penghentian bantuan.

Kegiatan verifikasi komitmen dapat dikecualikan jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*), dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.

#### 7. Pendampingan

Untuk mendorong perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, pendampingan sosial sangat diperlukan. Pendampingan ini berfungsi sebagai fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi, dan motivasi bagi KPM PKH.

Pelaksanaan pendampingan tidak hanya berfokus pada individu KPM yang mengalami kendala akses layanan, tetapi juga dilakukan secara

kelompok. Pendamping sosial PKH dapat melakukan pendampingan kelompok melalui:

- 1) Pertemuan Kelompok (PK) yang bersifat edukatif dan administratif, memberikan informasi mengenai aturan PKH, tata tertib, serta akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), yaitu kegiatan rutin yang bertujuan mempercepat perubahan perilaku KPM PKH melalui pembelajaran terstruktur.

#### 8. Transformasi Kepesertaan

Bantuan PKH diberikan selama enam tahun dengan harapan terjadi perubahan perilaku KPM dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta peningkatan status sosial ekonomi. Transformasi kepesertaan adalah proses pengakhiran status KPM melalui kegiatan resertifikasi. Pada kegiatan resertifikasi, KPM akan didata ulang dan dievaluasi status sosial ekonominya setelah menerima bantuan selama periode tertentu. Menjelang akhir tahun kelima, KPM akan menjalani resertifikasi. Hasilnya digunakan untuk menentukan status akhir kepesertaan, yaitu graduasi atau transisi.

##### 1) Transisi

Transisi adalah status peserta PKH yang masih memenuhi syarat program. Selama masa transisi, peserta tetap menerima bantuan selama tiga tahun dan dipersiapkan untuk mengikuti program pengentasan kemiskinan lainnya.

##### 2) Graduasi

Graduasi adalah status peserta yang memenuhi salah satu dari tiga kondisi berikut:

- 1) Masih miskin tetapi tidak memenuhi syarat PKH.

- 2) Tidak miskin tetapi masih memenuhi syarat PKH.
- 3) Tidak miskin dan tidak memenuhi syarat PKH.
- 4) Mekanisme graduasi dijelaskan secara rinci dalam Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat PKH.

## **2.2 Proses Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin**

Proses pemberdayaan ekonomi fakir miskin merupakan tahapan penting yang menghubungkan penyaluran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan akhir berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai pemberian bantuan tunai, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan keluarga fakir miskin dalam mengelola serta mengembangkan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Dalam konteks PKH, proses pemberdayaan dimulai dari pemanfaatan bantuan secara tepat guna dan diarahkan untuk mendorong perubahan pola pikir keluarga penerima manfaat agar tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan sosial (Kementerian Sosial RI, 2023).

Pendampingan sosial menjadi komponen utama dalam proses pemberdayaan ekonomi fakir miskin. Pendamping PKH berperan sebagai fasilitator yang membantu keluarga penerima manfaat memahami tujuan program, kewajiban sebagai penerima bantuan, serta strategi pengelolaan keuangan rumah tangga secara sederhana dan realistis. Melalui pendampingan yang dilakukan secara berkala, keluarga fakir miskin didorong untuk mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, merencanakan pengeluaran rumah tangga, serta memanfaatkan bantuan secara lebih produktif. Pendampingan ini diharapkan dapat membangun kesadaran, kepercayaan diri, dan kemampuan keluarga miskin dalam memperbaiki kondisi ekonominya secara bertahap (BPS, 2024).

Selain pendampingan sosial, proses pemberdayaan ekonomi juga dilakukan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang menjadi media edukasi bagi keluarga penerima manfaat. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan dasar, seperti pengelolaan keuangan keluarga, perencanaan ekonomi sederhana, serta penguatan motivasi untuk berusaha. Melalui P2K2, keluarga fakir miskin tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran dan diskusi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek bantuan (OECD, 2022).

Proses pemberdayaan ekonomi fakir miskin melalui PKH juga diarahkan pada pencapaian kemandirian ekonomi secara bertahap. Kemandirian dimaknai sebagai kemampuan keluarga miskin untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial melalui peningkatan kapasitas ekonomi dan pengelolaan sumber pendapatan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, proses pemberdayaan ini diharapkan mampu mendorong keluarga penerima manfaat untuk mengembangkan usaha kecil, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi melalui PKH menjadi proses transformasi sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan fakir miskin secara berkelanjutan (Kementerian Sosial RI, 2024).

## **2.3 Kesejahteraan**

### **2.3.1 Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kesejahteraan dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat,

seperti kesehatan yang baik, tingkat pendidikan yang tinggi, pendapatan yang layak, serta daya beli yang memadai. Studi Sultan et al., (2023) menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Keempat indikator ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti semakin baik kualitas kesejahteraan masyarakat maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hal ini menjadikan kesejahteraan sebagai prioritas utama dalam setiap program pembangunan, termasuk dalam konteks daerah seperti Aceh, di mana indikator kemiskinan dan pengangguran menjadi tantangan penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang diterapkan oleh sebuah bangsa untuk menyediakan manfaat dan layanan yang bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, serta kesehatan yang esensial bagi kelangsungan hidup komunitas tersebut. Individu yang memiliki keterbatasan kemampuan cenderung mengalami tingkat kesejahteraan yang rendah, karena keterbatasan tersebut dapat menghambat pencapaian fungsi-fungsi tertentu sehingga berdampak pada ketidaksejahteraan. Konsep kesejahteraan sendiri memiliki beragam definisi, mengingat sifatnya yang subjektif; setiap individu dengan pedoman, tujuan, dan gaya hidup yang berbeda akan menilai kesejahteraan serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan secara berbeda pula. Program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Perencanaan yang mengarah pada penyusunan program-program kesejahteraan atau pengembangan usaha di suatu wilayah perlu

dilakukan melalui analisis kebutuhan masyarakat secara mendalam. Analisis tersebut harus memastikan bahwa kebutuhan yang dipenuhi benar-benar merupakan kebutuhan mayoritas masyarakat, bukan sekadar keinginan segelintir individu, baik tokoh masyarakat maupun kepala desa yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Pembangunan masyarakat sebaiknya mencakup upaya untuk meningkatkan partisipasi serta rasa memiliki terhadap program yang dijalankan, sekaligus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat (Gorahe et al., 2021).

### **2.3.2 Indikator Kesejahteraan**

Indeks Kesejahteraan merupakan tolak ukur yang menentukan kesejahteraan suatu masyarakat. Untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah, diperlukan berbagai indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi dasar penilaian capaian tersebut. Indikator kesejahteraan masyarakat bersifat luas atau multidimensi, serta rumit, sehingga penilaian terhadap tingkat kesejahteraannya hanya mungkin dilakukan melalui indikator-indikator yang terukur dari beragam aspek pembangunan. Indikator kesejahteraan masyarakat mencakup indikator pendidikan, indikator ketenagakerjaan, indikator demografi, indikator kesehatan, serta indikator sosial lainnya (Bustaman et al., 2021).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 menyajikan pengukuran taraf hidup masyarakat melalui delapan dimensi pokok, meliputi kependudukan, kesehatan serta gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola dan tingkat konsumsi, perumahan beserta lingkungan, kemiskinan, serta berbagai aspek sosial lainnya. Kedelapan dimensi tersebut memberikan perspektif komprehensif mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat, termasuk indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, ketersediaan akses layanan kesehatan, mutu perumahan, serta derajat kemiskinan dan disparitas ekonomi. Pendekatan

multidimensi ini bersifat krusial karena kesejahteraan tidak semata-mata dinilai berdasarkan pendapatan, melainkan juga dari kapasitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer, mendapatkan pendidikan yang memadai, serta menikmati lingkungan yang sehat dan aman (Badan Pusat Statistik, 2024). Menurut penelitian Sari et al., 2023 Kementerian Sosial (Kemensos) membagi indikator kesejahteraan menjadi sepuluh (10) desil tingkat kesejahteraan keluarga, yaitu:

**Tabel 2. 3**  
**Kategori Desil / Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

<b>Kategori Desil</b>	<b>Pengeluaran per Kapita/Bulan (+)</b>	<b>Ciri Ekonomi dan Sosial</b>
<b>Desil 1</b>	< Rp 500.000	<b>Sangat miskin:</b> Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar; tinggal di daerah terpencil atau permukiman kumuh; rumah tidak layak huni sangat rentan terhadap gizi buruk dan penyakit.
<b>Desil 2</b>	Rp 600.000 – Rp 700.000	<b>Miskin:</b> Masih kesulitan memenuhi kebutuhan makanan bergizi, bekerja di sektor informal kasar akses pendidikan dan layanan kesehatan sangat terbatas.
<b>Desil 3</b>	Rp 800.000 – Rp 900.000	<b>Hampir miskin:</b> Mulai mampu memenuhi konsumsi makanan pokok secara rutin tinggal di rumah sederhana; sangat rentan kembali jatuh miskin akibat guncangan ekonomi.
<b>Desil 4</b>	Rp 1.000.000 – Rp 1.200.000	<b>Menengah bawah:</b> Konsumsi rumah tangga lebih beragam; mulai memiliki kendaraan roda dua, anak-anak bersekolah pada tingkat dasar atau sederajat.
<b>Desil 5</b>	Rp 1.300.000 – Rp 1.500.000	<b>Menengah bawah (relatif stabil):</b> Akses terhadap listrik, air bersih, dan pendidikan lebih baik, mulai memiliki kemampuan menabung dalam jumlah kecil.
<b>Desil 6</b>	Rp 1.600.000 – Rp 1.800.000	<b>Menengah:</b> Pengeluaran non-makanan meningkat (transportasi, komunikasi), mulai

Kategori Desil	Pengeluaran per Kapita/Bulan (+)	Ciri Ekonomi dan Sosial
		memiliki jaminan kesehatan mandiri seperti BPJS.
<b>Desil 7</b>	Rp 2.000.000 – Rp 2.300.000	<b>Menengah atas:</b> Memiliki kendaraan pribadi, gawai, dan akses internet, pendidikan anak menjadi prioritas utama keluarga.
<b>Desil 8</b>	Rp 2.500.000 – Rp 3.000.000	<b>Mapan:</b> Mampu melakukan kegiatan rekreasi; memiliki kredit rumah atau kendaraan, mulai berinvestasi dalam bentuk emas atau deposito.
<b>Desil 9</b>	Rp 3.500.000 – Rp 4.500.000	<b>Kaya:</b> Tinggal di kawasan perkotaan; rumah permanen dan layak, bekerja sebagai wirasaha atau profesional, akses layanan publik dan swasta premium.
<b>Desil 10</b>	> Rp 5.000.000	<b>Sangat kaya / elit:</b> Pola konsumsi mewah (perjalanan luar negeri, properti), kepemilikan aset dan investasi besar, memiliki pengaruh dan kekuasaan ekonomi.

Sumber: Kemensos 2025

Tabel kategori desil yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat berperan dalam menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga berdasarkan pengeluaran per kapita setiap bulan. Metode desil ini membagi masyarakat menjadi sepuluh kelompok, dari yang memiliki kesejahteraan paling rendah (Desil 1) hingga yang paling tinggi (Desil 10). Pengelompokan semacam ini krusial untuk memahami kesenjangan sosial-ekonomi, menentukan target program bantuan sosial, serta menilai keberhasilan kebijakan kesejahteraan masyarakat.

Desil 1 dan Desil 2 mewakili kelompok masyarakat yang sangat miskin dan miskin. Rumah tangga dalam kategori ini belum dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan bergizi, hunian yang layak, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Tempat tinggal mereka biasanya terletak di daerah terpencil atau pemukiman padat yang rentan terhadap masalah gizi buruk, penyakit, serta

guncangan ekonomi. Kelompok ini menjadi fokus utama dalam program perlindungan sosial, termasuk bantuan tunai bersyarat dan jaminan sosial. Desil 3 diklasifikasikan sebagai kelompok hampir miskin, yakni masyarakat yang mulai dapat memenuhi kebutuhan dasar secara teratur, tetapi masih sangat rentan jatuh kembali ke kemiskinan jika menghadapi krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau bencana. Oleh sebab itu, kelompok ini membutuhkan intervensi kebijakan pencegahan untuk mencegah kemiskinan berulang. Desil 4 dan Desil 5 termasuk dalam kategori menengah bawah. Rumah tangga di kelompok ini umumnya memiliki akses yang lebih baik ke kebutuhan dasar, seperti listrik, air bersih, pendidikan dasar, serta sarana transportasi sederhana. Meskipun kondisi ekonomi mereka relatif lebih stabil dibandingkan kelompok sebelumnya, kemampuan menabung masih terbatas dan ketahanan ekonomi jangka panjang belum sepenuhnya kokoh.

Desil 6 dan Desil 7 mencerminkan kelompok kelas menengah dan menengah atas. Di kelompok ini, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan meningkat, meliputi transportasi, komunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Rumah tangga biasanya telah memiliki asuransi kesehatan mandiri, kendaraan pribadi, serta akses ke teknologi informasi. Pendidikan anak menjadi prioritas utama sebagai investasi untuk masa depan. Desil 8 dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mapan, dengan tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi. Rumah tangga di sini mampu memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder, serta mulai terlibat dalam kegiatan rekreasi dan investasi seperti tabungan, emas, atau deposito. Stabilitas ekonomi kelompok ini relatif baik. Desil 9 dan Desil 10 merupakan kelompok masyarakat kaya dan sangat kaya (elit). Kelompok ini menunjukkan pengeluaran per kapita yang tinggi, kepemilikan aset dan investasi besar, serta pola konsumsi yang mewah. Selain akses penuh ke layanan publik

dan swasta berkualitas tinggi, mereka juga memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan dalam struktur sosial dan pembangunan.

### **2.3.3 Kesejahteraan Ekonomi Fakir Miskin**

Kesejahteraan ekonomi fakir miskin merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan seluruh rangkaian proses pemberdayaan ekonomi yang menyertainya. Kesejahteraan dalam konteks ini tidak semata-mata diukur dari peningkatan pendapatan atau terpenuhinya kebutuhan material jangka pendek, tetapi mencakup kondisi kehidupan yang lebih layak, stabil, dan berkelanjutan. Kesejahteraan ekonomi fakir miskin tercermin dari kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, tanpa harus berada dalam kondisi kerentanan ekonomi yang tinggi (Bappenas, 2022).

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kesejahteraan ekonomi juga berkaitan dengan kemampuan rumah tangga miskin untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ketahanan ekonomi. Hal ini mencakup adanya sumber pendapatan yang relatif stabil, kemampuan mengelola keuangan rumah tangga secara lebih baik, serta berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan sosial. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi fakir miskin tidak hanya dipahami sebagai kondisi statis, tetapi sebagai proses dinamis yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu sebagai hasil dari intervensi kebijakan dan upaya pemberdayaan (Kemensos RI, 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan ekonomi fakir miskin dipahami secara lebih komprehensif melalui konsep *falah*, yaitu kondisi kehidupan yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari kecukupan harta, tetapi juga dari terciptanya rasa aman, keadilan, dan ketenangan hidup. Islam menekankan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan harus dilakukan melalui cara-cara yang halal,

adil, dan bermartabat, serta tidak menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kesejahteraan ekonomi fakir miskin dalam perspektif Islam menuntut adanya kemandirian ekonomi yang didukung oleh nilai ikhtiar, tanggung jawab, dan kepedulian sosial (Huda & Nasution, 2021).

Dalam konteks penelitian ini, kesejahteraan ekonomi fakir miskin diukur melalui perubahan kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat PKH, seperti meningkatnya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, membaiknya pengelolaan keuangan rumah tangga, serta adanya upaya pengembangan kegiatan ekonomi produktif. Selain itu, kesejahteraan juga tercermin dari berkurangnya tingkat kerentanan ekonomi dan meningkatnya rasa percaya diri keluarga fakir miskin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi fakir miskin menjadi indikator keberhasilan PKH sebagai program perlindungan sosial yang tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (BPS Kabupaten Pidie, 2025).

#### **2.3.4 Peran P2K2 dalam Program Keluarga Harapan (PKH)**

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). P2K2 dirancang sebagai media edukasi dan pemberdayaan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui proses pembelajaran kelompok yang dilakukan secara rutin dan terstruktur oleh pendamping sosial. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen perubahan perilaku dan peningkatan kualitas hidup keluarga miskin. Secara konseptual, P2K2 memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada keluarga penerima bantuan. Melalui modul pembelajaran yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan keluarga, serta perlindungan sosial, P2K2 bertujuan membentuk

kesadaran kritis KPM terhadap pentingnya investasi jangka panjang pada kualitas keluarga. Dengan demikian, bantuan sosial yang diterima tidak semata-mata bersifat konsumtif, melainkan menjadi stimulus untuk perubahan sosial dan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, P2K2 berperan dalam mendorong perubahan pola pikir (mindset) dan perilaku keluarga miskin. Proses diskusi kelompok yang partisipatif memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman antaranggota, sehingga tercipta pembelajaran kolektif. Perubahan perilaku yang diharapkan meliputi peningkatan kepedulian terhadap pendidikan anak, kesadaran menjaga kesehatan ibu dan balita, serta kemampuan mengelola keuangan rumah tangga secara lebih efektif.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, P2K2 juga berfungsi sebagai sarana penguatan kapasitas ekonomi keluarga. Materi mengenai perencanaan keuangan, budaya menabung, serta pengembangan usaha sederhana menjadi bagian penting dalam mendorong kemandirian ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan PKH untuk mengurangi ketergantungan keluarga terhadap bantuan sosial dan secara bertahap meningkatkan kesejahteraan mereka.

Lebih lanjut, P2K2 memiliki peran sosial dalam memperkuat solidaritas dan jaringan antar KPM. Interaksi rutin dalam kelompok menciptakan dukungan sosial yang dapat membantu keluarga menghadapi berbagai permasalahan ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, P2K2 tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme edukatif, tetapi juga sebagai wadah pembentukan modal sosial (social capital) di tingkat komunitas.

#### **2.4 Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Islam**

Pemberdayaan ekonomi dalam Islam pada dasarnya merupakan suatu usaha yang terstruktur untuk meningkatkan kemampuan umat dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, serta organisasi

yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan semata, melainkan juga menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan secara adil, pemerataan distribusi, serta penguatan nilai-nilai etika dalam proses produksi dan konsumsi. Dari sudut pandang ekonomi Islam, pemberdayaan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi zakat, infak, sedekah, wakaf, serta instrumen keuangan syariah lainnya guna mendukung aktivitas produktif masyarakat. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan (Hasniati *et al.*, 2021).

Peningkatan produksi dan pemberdayaan ekonomi umat tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal semata, melainkan juga pada pengelolaan sumber daya sosial-keagamaan seperti zakat yang diarahkan untuk menciptakan pendapatan yang berkelanjutan. Penelitian terkini mengungkapkan bahwa pendekatan distribusi zakat secara produktif misalnya melalui pemberian modal usaha, penyediaan peralatan kerja, dan pelatihan kewirausahaan terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan ekonomi jangka panjang dibandingkan dengan pemberian bantuan tunai secara temporer. Dengan mengubah pola distribusi zakat dari cara tradisional menjadi program yang fokus pada pengembangan usaha produktif, penerima zakat berpeluang untuk bertransformasi dari sekadar penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, sehingga memperbesar dampak pemberdayaan sekaligus mengurangi ketergantungan dalam jangka panjang (Sarif *et al.*, 2024).

#### **2.4.1 Kesejahteraan dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Islam**

Kesejahteraan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi Islam dipahami sebagai suatu kondisi menyeluruh yang meliputi aspek materi, spiritual, sosial, dan moral (falah). Pendekatan pemberdayaan ini menitikberatkan pada optimalisasi sumber daya umat, seperti zakat, wakaf, modal produktif, serta

organisasi komunitas, guna mendorong aktivitas produktif yang sesuai dengan prinsip halal dan etika. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga keseimbangan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan finansial semata, melainkan juga memperkuat martabat, kemandirian, serta akses masyarakat terhadap kebutuhan primer, sekunder, dan peluang ekonomi yang adil. Pendekatan ini sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah yang menempatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama (Hasniati et al., 2021). Kesejahteraan dalam islam adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhi Kebutuhan Lahiriyyah

Menyembah Tuhan (Allah) adalah kesejahteraan yang paling penting dalam Al-Qur'an, yang menyiratkan bahwa proses kesejahteraan didahului dengan pengembangan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, yang terpenting adalah masyarakat yang benar-benar menjadikan Tuhan sebagai pelindung, pelindung, dan penyerahan sepenuhnya kepada Sang Pencipta.

2. Menghilangkan rasa lapar

Artinya dimulai dengan penegasan kembali tauhid, bahwa Allah SWT yang memberi makan orang yang lapar, dan makanan itu adalah anugerah dari Allah SWT.

3. Singkirkan rasa takut

Terciptanya rasa aman, nyaman, dan tentram merupakan salah satu indikator masyarakat sejahtera. Jika masih banyak terjadi tindak kriminal seperti perampokan, pembunuhan, atau kejahatan lainnya, bisa jadi kota ini belum makmur. Selain kedamaian lingkungan, diperlukan kedamaian batin, yang dicapai

dengan menjadi istiqomah dalam iman. Karena hanya Allah SWT yang bisa memberikan ketenangan yang hakiki.

## **2.4.2 Nilai-Nilai Pemberdayaan Ekonomi Islam**

Pemberdayaan ekonomi fakir miskin dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga menekankan nilai-nilai etis dan moral yang menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam memandang kemiskinan sebagai permasalahan struktural dan sosial yang harus ditangani melalui pendekatan keadilan, kepedulian sosial, serta dorongan untuk kemandirian. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif ekonomi Islam perlu diarahkan agar tidak hanya bersifat bantuan konsumtif, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan yang mampu mendorong perubahan kondisi ekonomi fakir miskin secara berkelanjutan dan bermartabat (Chapra, 2021).

Nilai-nilai pemberdayaan ekonomi Islam yang menjadi landasan dalam penelitian ini meliputi beberapa prinsip utama, yaitu keadilan, tolong-menolong, amanah, dan ikhtiar. Nilai-nilai tersebut saling berkaitan dan menjadi pedoman etis dalam menilai efektivitas PKH sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

### **2.4.2.1 Nilai Keadilan (Al-'Adl)**

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang menekankan perlakuan yang adil dan proporsional kepada setiap individu sesuai dengan kebutuhannya. Dalam konteks PKH, nilai keadilan tercermin melalui upaya penyaluran bantuan secara tepat sasaran kepada keluarga fakir miskin yang benar-benar membutuhkan. Keadilan juga menuntut adanya transparansi dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan agar tidak menimbulkan ketimpangan

atau kecemburuan sosial di masyarakat. Dengan demikian, keadilan menjadi dasar agar program bantuan sosial mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Chapra, 2021).

#### **2.4.2.2 Nilai Tolong-Menolong (Ta'awun)**

Nilai ta'awun atau tolong-menolong merupakan prinsip penting dalam Islam yang menekankan solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama, khususnya kelompok yang lemah secara ekonomi. Dalam pelaksanaan PKH, nilai ta'awun tercermin dalam peran negara sebagai pihak yang bertanggung jawab membantu masyarakat fakir miskin melalui kebijakan perlindungan sosial. Selain itu, nilai ini juga terlihat dalam peran pendamping PKH dan masyarakat sekitar yang turut mendukung keluarga penerima manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Ta'awun menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama (Qardhawi, 2022).

#### **2.4.2.3 Nilai Amanah**

Amanah merupakan nilai moral yang menuntut adanya tanggung jawab dan kejujuran dalam menjalankan peran dan kewajiban. Dalam konteks PKH, nilai amanah tidak hanya berlaku bagi pemerintah dan pendamping program, tetapi juga bagi keluarga penerima manfaat. Pemerintah berkewajiban menyalurkan bantuan secara transparan dan akuntabel, sementara keluarga penerima manfaat bertanggung jawab menggunakan bantuan sesuai dengan tujuan program, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Penerapan nilai amanah menjadi penting agar bantuan sosial tidak disalahgunakan dan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan fakir miskin (Kementerian Sosial RI, 2023).

#### **2.4.2.4 Nilai Ikhtiar dan Kemandirian**

Ikhtiar merupakan prinsip yang menekankan pentingnya usaha dan kerja keras dalam memperbaiki kondisi kehidupan. Dalam pemberdayaan ekonomi Islam, bantuan sosial seperti PKH tidak dimaksudkan untuk menciptakan ketergantungan, tetapi sebagai sarana awal yang mendorong keluarga fakir miskin untuk berusaha meningkatkan kondisi ekonominya secara mandiri. Nilai ikhtiar menuntut keluarga penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan sebagai peluang memperbaiki kehidupan, baik melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik maupun melalui kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian, ikhtiar menjadi dasar bagi terwujudnya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan (Chapra, 2021).

#### **2.5 Keterkaitan Antara PKH dengan Kesejahteraan**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah inisiatif bantuan bersyarat non-tunai yang ditujukan kepada keluarga miskin, yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam jangka pendek, PKH bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga penerima manfaat tersebut. Selanjutnya, pada jangka menengah, program ini diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku peserta dalam memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga tercipta generasi yang lebih sehat dan cerdas. Sedangkan dalam jangka panjang, PKH berperan dalam memutus siklus kemiskinan yang terjadi antar generasi. Adapun sasaran khusus dari PKH mencakup lima aspek utama (Kemensos, 2021):

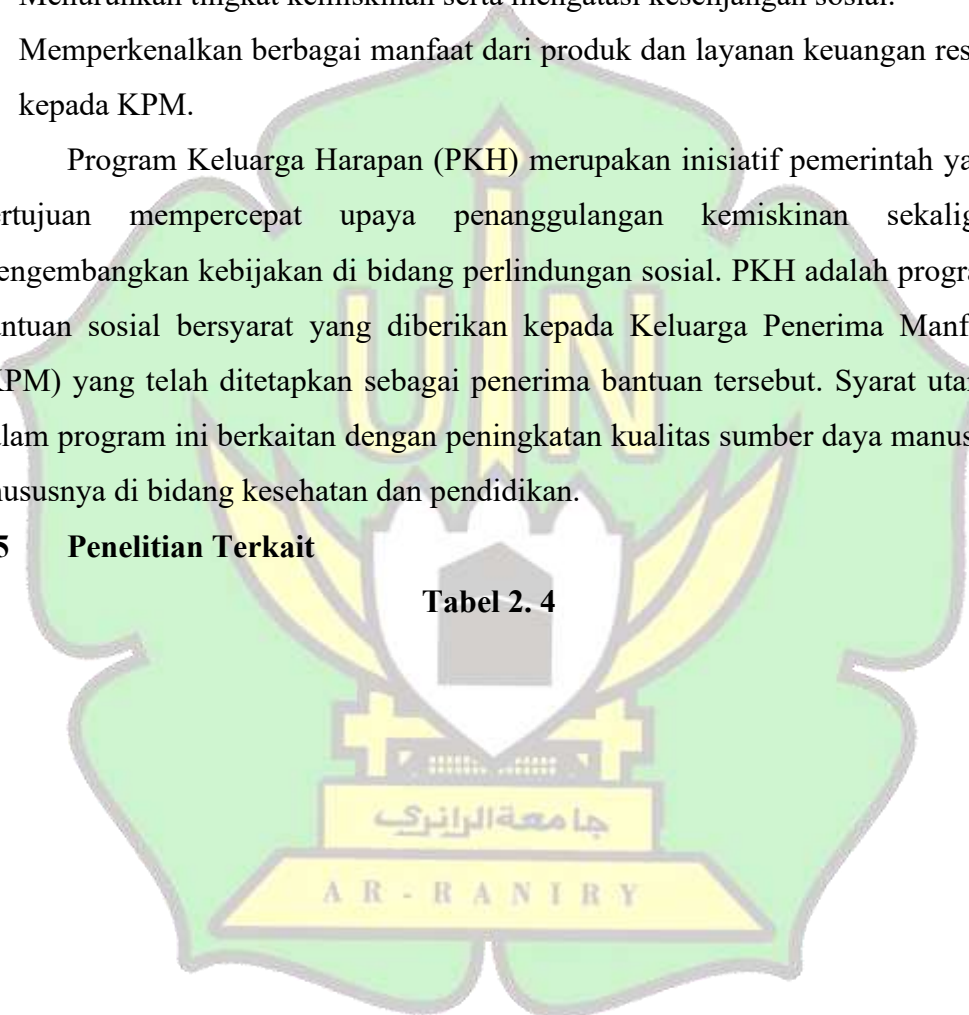
1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat (KPM) melalui kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.

2. Mengurangi beban biaya pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan bagi keluarga penerima manfaat.
3. Mendorong perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
4. Menurunkan tingkat kemiskinan serta mengatasi kesenjangan sosial.
5. Memperkenalkan berbagai manfaat dari produk dan layanan keuangan resmi kepada KPM.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan sekaligus mengembangkan kebijakan di bidang perlindungan sosial. PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut. Syarat utama dalam program ini berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

## 2.5 Penelitian Terkait

Tabel 2. 4



## Penelitian Terkait

No	Peneliti & Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Virna Museliza, Afrizal, & Risma Eliza (2020). Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	Kuantitatif, 95 responden dengan teknik Slovin, analisis regresi	Sama-sama meneliti dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat miskin	Fokus di Pekanbaru, pendekatan kuantitatif, sementara skripsi di Pidie dengan perspektif Ekonomi Islam (kualitatif)
2	Siswati Saragi, Maria Ulfa Batoebara, & Nur Ambia Arma (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak	Kualitatif deskriptif, analisis Miles & Huberman	Sama-sama membahas implementasi/penyaluran PKH	Fokus penelitian pada mekanisme pelaksanaan dan kendala teknis, sedangkan skripsi lebih menekankan dampak terhadap kesejahteraan ekonomi fakir miskin
3	Winda Jayanti & Rina Novianty (2021). Pengaruh PKH terhadap Pengentasan Kemiskinan	Kuantitatif-deskriptif, analisis korelasi	Sama-sama menilai PKH dengan perspektif Ekonomi Islam	Lokasi di Bone, fokus pada pengentasan kemiskinan, skripsi fokus pada kesejahteraan

No	Peneliti & Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	dalam Perspektif Ekonomi Islam			fakir miskin di Aceh
4	Sainudin Latare, Rudy Harold, Sahrain Bumulo, & Ahmad Ali (2023). The Impact of the Family Hope Program in Poverty Alleviation in Bangga Village, Paguyaman Pantai District	Kualitatif deskriptif	Sama-sama meneliti dampak PKH di pedesaan	Lokasi di Gorontalo, tanpa perspektif ekonomi Islam, skripsi di Pidie dengan pendekatan keislaman
5	Nur Hidayatingsih & Ainur Rofiq Sofa (2025). Implementasi Pendidikan Karakter Islami dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dawuhan	Kualitatif (wawancara, observasi, dokumentasi)	Sama-sama mengaitkan PKH dengan nilai-nilai Islam	Fokus pada pendidikan karakter Islami, bukan langsung pada kesejahteraan ekonomi, skripsi lebih menekankan pemberdayaan ekonomi fakir miskin

Sumber: Data Diolah (2025)

Beberapa studi terdahulu telah menyoroti peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di berbagai wilayah. Museliza, Afrizal, dan Eliza (2020) mengungkapkan bahwa PKH memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kecamatan Tampan, Pekanbaru, dengan tingkat pengaruh sebesar 34,5%. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dan analisis

regresi, sehingga memperkuat bukti adanya hubungan signifikan antara bantuan PKH dan kondisi sosial-ekonomi keluarga.

Selanjutnya, Saragi, Batoebara, dan Arma (2021) melakukan penelitian mengenai pelaksanaan PKH di Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak. Penelitian kualitatif ini berfokus pada proses implementasi, mulai dari seleksi peserta hingga kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PKH telah memberikan bantuan kepada keluarga miskin, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan dalam mengumpulkan peserta untuk kegiatan pembinaan.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, Jayanti dan Novianty (2021) menemukan bahwa PKH turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bone, meskipun pengaruhnya relatif kecil, yaitu sebesar 3,8%. Penelitian ini menilai bahwa PKH berperan sebagai jaminan sosial pemerintah, sehingga belum sepenuhnya mampu mewujudkan kesejahteraan (*falah*) menurut perspektif Islam.

Penelitian serupa juga diperkuat oleh Latore, Harold, Bumulo, dan Ali (2023) yang meneliti dampak PKH di Desa Bangga, Gorontalo menunjukkan bahwa walaupun besaran bantuan PKH tidak besar, program tersebut efektif dalam meringankan beban keluarga miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan.

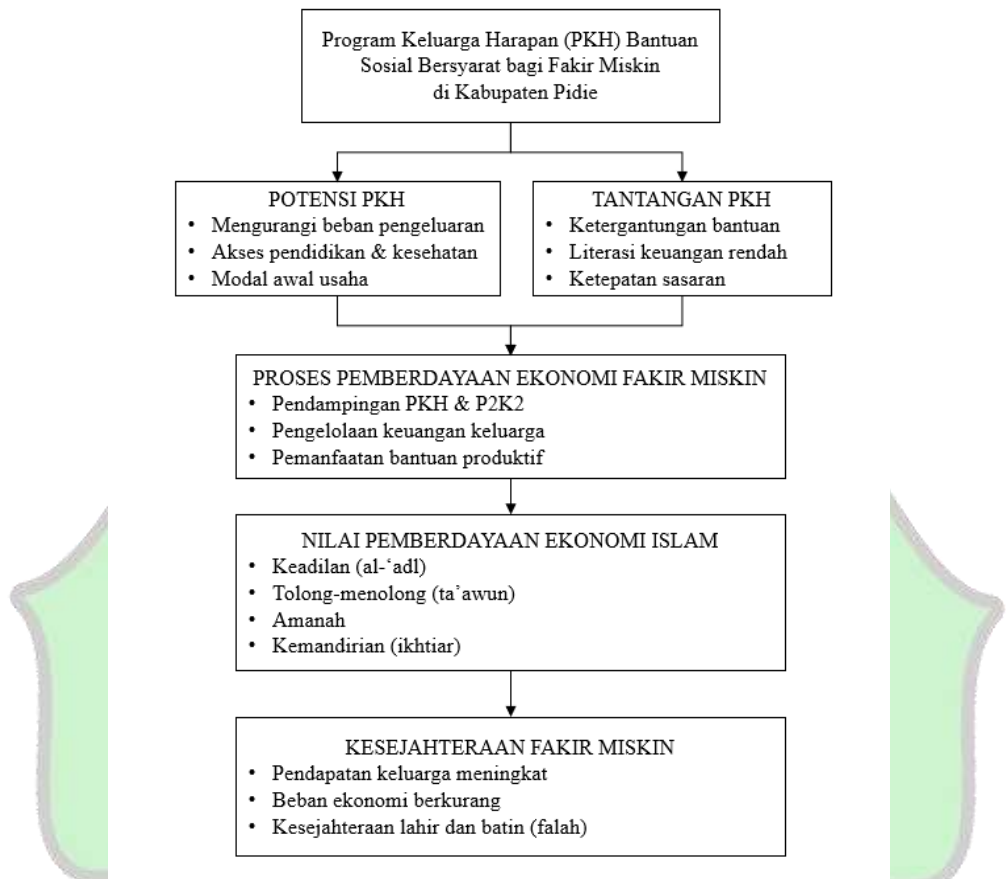
Sementara itu, Hidayatingsih dan Sofa (2025) mengkaji penerapan pendidikan karakter Islami dalam PKH di Desa Dawuhan. Hasil penelitian mereka menegaskan bahwa nilai-nilai Islami seperti kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas memiliki peran penting dalam memperkuat keberhasilan program, karena mampu membentuk moralitas serta meningkatkan kohesi sosial di masyarakat.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa secara umum Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kontribusi yang positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan konsumsi rumah tangga. Meskipun demikian, sebagian besar kajian yang ada masih cenderung menitikberatkan pada aspek teknis pelaksanaan program, efektivitas penyaluran bantuan, serta dampak ekonomi secara kuantitatif, seperti peningkatan pendapatan atau daya beli penerima manfaat. Sementara itu, dimensi religius dan nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan konsep pemberdayaan ekonomi Islam—seperti keadilan, kemandirian, tanggung jawab, dan tolong-menolong—belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, nilai-nilai tersebut memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran dan perilaku ekonomi masyarakat miskin agar tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga mampu berproses menuju kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan mengkaji secara komprehensif dampak penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan ekonomi fakir miskin di Kabupaten Pidie melalui perspektif pemberdayaan ekonomi Islam, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan sosial yang lebih berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan

## **2.6 Kerangka Berpikir**

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini di tunjukkan pada gambar berikut.

### **Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir**



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dirancang untuk mengilustrasikan jalur pemikiran peneliti saat mengkaji pengaruh distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) pada kemakmuran ekonomi masyarakat miskin di Kabupaten Pidie, dengan sudut pandang pemberdayaan ekonomi berbasis Islam.

Program Keluarga Harapan adalah program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pokok, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam implementasinya, PKH berpotensi mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta berfungsi sebagai modal awal bagi penerima

manfaat untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Meskipun demikian, program ini dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti kecenderungan ketergantungan pada bantuan, rendahnya pemahaman keluarga penerima tentang pengelolaan keuangan, serta akurasi dalam penargetan penerima bantuan.

Potensi dan hambatan tersebut selanjutnya mempengaruhi mekanisme pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Pemberdayaan ini dilaksanakan melalui pendampingan sosial oleh fasilitator PKH, kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), pengaturan keuangan rumah tangga, serta penggunaan bantuan yang lebih produktif. Mekanisme ini diharapkan tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan mampu mendorong perubahan pola perilaku ekonomi menuju kemandirian.

Mekanisme pemberdayaan tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi Islam, seperti keadilan (al-'adl), saling tolong-menolong (ta'awun), amanah, dan usaha mandiri (ikhtiar). Prinsip-prinsip ini berperan sebagai dasar etis untuk menilai sejauh mana PKH dapat memberdayakan masyarakat miskin secara lestari.

Hasil akhir dari serangkaian proses ini adalah terwujudnya kemakmuran ekonomi bagi masyarakat miskin, yang ditunjukkan oleh peningkatan penghasilan keluarga, penurunan beban ekonomi, perbaikan akses pendidikan dan kesehatan, serta pencapaian kesejahteraan jasmani dan rohani (falah) sesuai dengan tujuan ekonomi Islam.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang komprehensif dan kompleks yang dapat direpresentasikan dengan kata-kata, melaporkan hasil yang detail dari sumber informasi dan dilakukan di lingkungan alam. Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan secara naratif tindakan yang dilakukan dan dampak tindakan tersebut terhadap kehidupan mereka (Fadli, 2021).

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian merupakan tahap penting dalam studi lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang cukup besar serta tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Selain itu, karakter sosial budaya masyarakat yang kuat dengan nilai-nilai Islam serta pelaksanaan PKH yang berlangsung secara intensif menjadikan Kabupaten Pidie sebagai lokasi yang relevan untuk penelitian ini. Pemilihan lokasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai dampak PKH terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi Islam dalam konteks lokal.

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan asal informasi yang digunakan peneliti untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Sumber data berfungsi sebagai dasar utama dalam proses

analisis dan penarikan kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman informasi dan konteks sosial

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan. Data ini dikumpulkan melalui interaksi langsung antara peneliti dengan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- **Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH**, sebagai pihak yang menerima langsung bantuan dan merasakan dampak program terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive sesuai dengan tujuan penelitian, salah satunya adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang berdomisili di Gampong Blang Paseh, Kabupaten Pidie. Penentuan informan KPM dilakukan melalui koordinasi awal dengan aparatur gampong dan pendamping PKH setempat untuk memperoleh informasi mengenai keluarga penerima PKH yang masih aktif dan tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari hasil koordinasi tersebut, peneliti menetapkan kriteria informan, yaitu keluarga fakir miskin yang secara resmi terdaftar sebagai penerima PKH, telah menerima bantuan minimal selama satu tahun, berdomisili tetap di Gampong Blang Paseh, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka. Berdasarkan kriteria tersebut, dipilih enam orang KPM sebagai informan penelitian dengan mempertimbangkan

perbedaan kondisi ekonomi, komposisi anggota keluarga, serta pengalaman dalam memanfaatkan bantuan PKH. Pemilihan jumlah informan ini dinilai telah mencukupi dalam penelitian kualitatif karena menekankan pada kedalaman dan kekayaan data, bukan pada jumlah informan, sehingga informasi yang diperoleh mampu menggambarkan secara komprehensif dampak penyaluran PKH terhadap kesejahteraan ekonomi fakir miskin dalam perspektif pemberdayaan ekonomi Islam.

Pemilihan informan dalam penelitian ini yang seluruhnya merupakan ibu rumah tangga, sebagaimana ditunjukkan pada dokumentasi wawancara (gambar 1 dan seterusnya), didasarkan pada kondisi faktual di lapangan saat penelitian dilakukan. Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan pendamping PKH di Gampong Blang Paseh, diketahui bahwa ibu merupakan pihak yang secara langsung terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH serta berperan aktif dalam menerima, mengelola, dan memanfaatkan bantuan yang diberikan. Pada saat proses pengumpulan data, sebagian besar kepala keluarga laki-laki bekerja di luar rumah atau tidak berada di lokasi, sehingga ibu menjadi pihak yang paling memahami penggunaan bantuan PKH untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan ekonomi keluarga sehari-hari. Selain itu, ibu memiliki keterlibatan langsung dalam mengikuti pertemuan pendampingan PKH dan berinteraksi dengan pendamping sosial, sehingga memiliki informasi yang lebih lengkap terkait mekanisme, manfaat, dan perubahan kondisi ekonomi setelah menerima bantuan. Oleh karena itu, peneliti menetapkan ibu KPM sebagai informan utama karena dianggap paling relevan, representatif, dan mampu memberikan data yang mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

- **Pendamping PKH**, yang berperan dalam proses pendampingan, pembinaan, serta pemantauan pelaksanaan program di lapangan.
- **Pejabat atau staf Dinas Sosial Kabupaten Pidie**, khususnya yang terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran Program Keluarga Harapan.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung untuk menggali informasi terkait mekanisme penyaluran PKH, pemanfaatan bantuan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi fakir miskin.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi serta kredibilitas akademik. Sumber tersebut mencakup dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pidie, regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), serta data dan laporan statistik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku referensi dan artikel jurnal ilmiah yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemanfaatan data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat dasar teoritis penelitian, menunjang analisis hasil temuan di lapangan, serta memberikan gambaran mengenai konteks kebijakan dan kondisi sosial ekonomi yang relevan dengan objek penelitian.

### **3.4 Teknik Penentuan Informan**

Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kriteria informan meliputi:

1. Terdaftar sebagai KPM PKH aktif
2. Pendamping PKH yang bertugas di wilayah penelitian
3. Aparatur Dinas Sosial yang menangani PKH

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur terstruktur yang diterapkan oleh peneliti guna memperoleh informasi yang relevan, valid, serta reliabel, sejalan dengan sasaran penelitian. Pendekatan ini melibatkan beragam metode, seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan analisis dokumen, yang disesuaikan dengan sifat subjek serta situasi penelitian. Khusus dalam penelitian kualitatif, teknik tersebut memainkan peran esensial dalam mengeksplorasi data secara mendalam dan berorientasi konteks, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2023). Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian ini adalah:

#### **3.5.1 Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, peristiwa, atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian dalam lingkungan alaminya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data faktual yang relevan, objektif, serta mendalam mengenai kondisi di lapangan, sehingga dapat memahami keadaan yang benar-benar berlangsung. Metode observasi tersebut dapat diterapkan secara partisipan maupun non-partisipan, bergantung pada peran peneliti dalam proses penelitian. Observasi ini dilakukan agar bisa melakukan pengamatan langsung terhadap proses penyaluran PKH dan kegiatan ekonomi penerima manfaat.

### **3.5.2 Wawancara**

Wawancara merupakan bentuk percakapan yang memiliki tujuan spesifik. Proses ini melibatkan dua pihak utama, yakni pewawancara yang menyampaikan pertanyaan serta responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam konteks penelitian berbasis pendekatan kualitatif, individu yang menjadi target wawancara disebut sebagai informan. Lewat wawancara ini, diperoleh data mengenai penyaluran program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi fakir miskin di kabupaten pidie. Pada penelitian tersebut, peneliti menggunakan alat pengumpulan data:

1. Pengembangan pedoman wawancara
2. Pedoman wawancara, yang mana Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan penerima manfaat, pendamping PKH, dan pejabat Dinas Sosial untuk memperoleh informasi mendalam mengenai dampak program.

### **3.5.3 Dokumentasi**

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan proses pencarian, pengumpulan, serta analisis terhadap dokumen atau arsip yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dapat mencakup catatan tulisan, laporan resmi, arsip, foto, atau berbagai bentuk media lain yang mendukung kebutuhan data riset. Pendekatan ini memainkan peran krusial dalam melengkapi data primer, mengonfirmasi temuan penelitian, dan menyediakan perspektif yang lebih menyeluruh terhadap fenomena yang menjadi objek kajian (Chand, 2025).

### **3.6 Subjek dan Informan Penelitian**

Subjek penelitian ini mencakup individu dan pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian berfungsi sebagai sumber utama informasi yang memberikan data berdasarkan pengalaman, pemahaman, serta keterlibatan mereka terhadap fenomena yang diteliti (Dr. Umar Sidiqet., *et al*).

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena hanya individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terkait pelaksanaan serta dampak PKH yang mampu memberikan informasi secara mendalam (Palinkas et al., 2021).

Informan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa kelompok, yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sebagai pihak yang merasakan langsung dampak program terhadap kondisi ekonomi rumah tangga, pendamping PKH sebagai pelaksana di lapangan yang memahami mekanisme dan proses pendampingan, serta aparatur Dinas Sosial Kabupaten Pidie yang memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan PKH. Pemilihan subjek dan informan tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang menyeluruh dan mendalam mengenai implementasi PKH serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi Islam, seperti keadilan, kemandirian, dan kesejahteraan bersama.

### **3.7 Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan prosedur sistematis untuk mengidentifikasi dan mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, serta dokumen. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori,

pemecahan menjadi unit-unit terkecil, sintesis informasi, pembentukan pola, pemilihan aspek-aspek esensial, pemeriksaan mendalam, dan penarikan kesimpulan, sehingga hasilnya dapat dipahami dengan jelas baik oleh peneliti maupun pihak lain. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif dan dilakukan secara iteratif, mulai dari tahap sebelum memasuki lapangan, selama proses pengumpulan data, hingga setelahnya, guna mengungkap makna, pola, atau teori baru (Alt-Hessenbruch, 2022).

### **3.7.1 Reduksi Data**

Reduksi data didefinisikan sebagai tahap penyederhanaan yang melibatkan ringkasan, pemilihan, serta penekanan pada elemen-elemen utama dari kumpulan data yang luas dan rumit, sehingga menjadi lebih transparan dan terstruktur. Pada konteks penelitian kualitatif, proses ini dilakukan melalui penyaringan data yang esensial, menarik, inovatif, serta selaras dengan rumusan masalah penelitian, disertai dengan penyingkiran informasi yang tidak relevan. Pendekatan ini memfasilitasi peneliti dalam mengungkap tema atau pola spesifik, yang pada gilirannya memperlancar proses analisis data selanjutnya (Sugiyono, 2023).

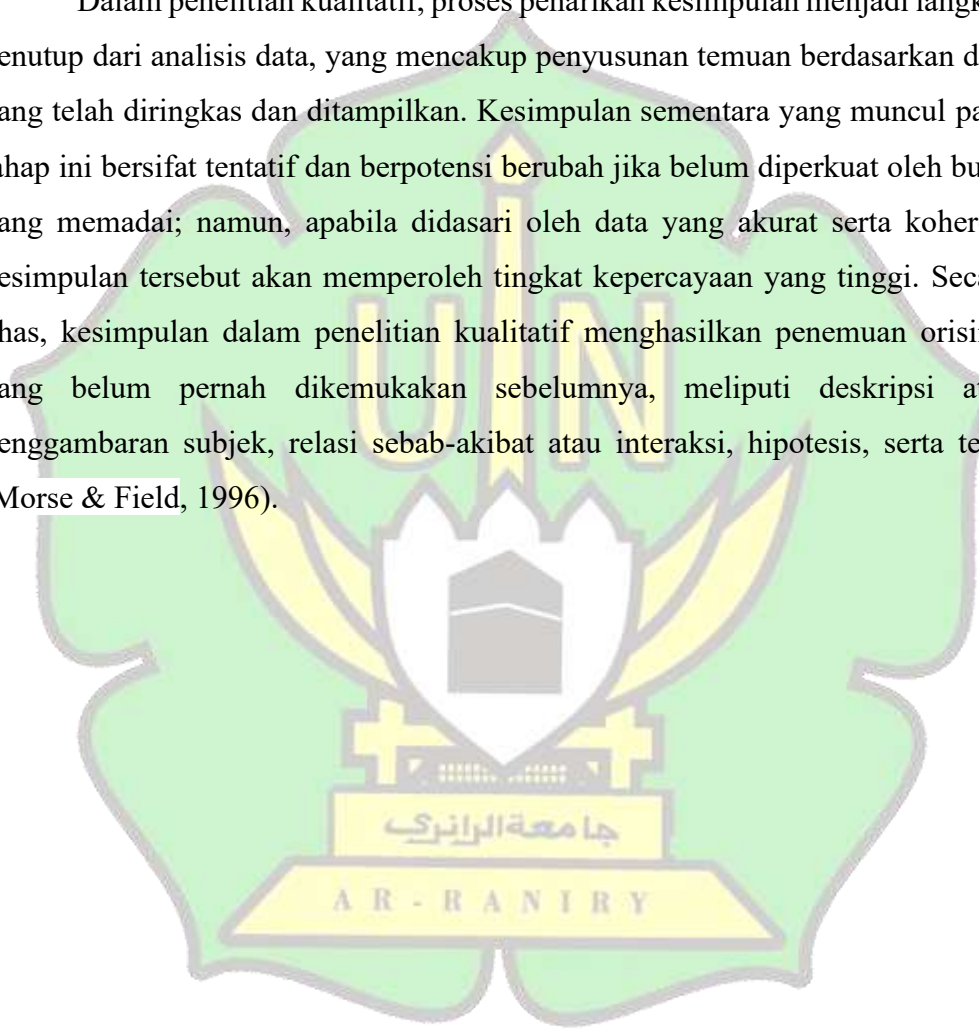
### **3.7.2 Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui berbagai bentuk, seperti uraian ringkas, bagan, keterkaitan antar kategori, flowchart, dan format lainnya. Proses penyajian ini bertujuan untuk membantu peneliti lebih mudah memahami situasi yang sedang berlangsung serta merencanakan langkah kerja berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Karena fenomena sosial dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan rumit, data yang diperoleh di lapangan cenderung mengalami perkembangan. Oleh sebab itu, penting untuk

memverifikasi apakah temuan di lapangan masih dalam tahap perkembangan atau sudah stabil (Sugiyono, 2017).

### 3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, proses penarikan kesimpulan menjadi langkah penutup dari analisis data, yang mencakup penyusunan temuan berdasarkan data yang telah diringkas dan ditampilkan. Kesimpulan sementara yang muncul pada tahap ini bersifat tentatif dan berpotensi berubah jika belum diperkuat oleh bukti yang memadai; namun, apabila didasari oleh data yang akurat serta koheren, kesimpulan tersebut akan memperoleh tingkat kepercayaan yang tinggi. Secara khas, kesimpulan dalam penelitian kualitatif menghasilkan penemuan orisinal yang belum pernah dikemukakan sebelumnya, meliputi deskripsi atau penggambaran subjek, relasi sebab-akibat atau interaksi, hipotesis, serta teori (Morse & Field, 1996).



## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Kabupaten Pidie**

Kabupaten Pidie merupakan salah satu wilayah administrasi di Provinsi Aceh yang terletak di bagian utara Pulau Sumatra. Secara geografis, Kabupaten Pidie berada pada posisi 4°30'–4°60' Lintang Utara dan 95°75'–96°20' Bujur Timur. Wilayah ini berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Pidie Jaya di sebelah timur, Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya di sebelah selatan, serta Kabupaten Aceh Besar di sebelah barat. Ibu kota Kabupaten Pidie adalah Kota Sigli yang berjarak sekitar 112 kilometer dari Banda Aceh. Luas wilayah Kabupaten Pidie mencapai 3.184,46 km<sup>2</sup> dan terbagi ke dalam 23 kecamatan, 94 mukim, serta 731 desa. Sebagian besar wilayah desa di Kabupaten Pidie merupakan daerah non-pesisir, sedangkan desa pesisir hanya mencakup sebagian kecil wilayah. Kondisi iklim di Kabupaten Pidie ditandai dengan curah hujan yang cukup tinggi, dengan rata-rata hari hujan sekitar 8,41 hari per bulan, sehingga mendukung aktivitas pertanian masyarakat setempat (BPS Kabupaten Pidie, 2023).

Jumlah penduduk Kabupaten Pidie pada tahun 2022 tercatat sebanyak 444.505 jiwa, terdiri dari 220.536 penduduk laki-laki dan 223.969 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk mencapai 140 jiwa per km<sup>2</sup>, yang menunjukkan sebaran penduduk relatif merata di seluruh wilayah kabupaten. Struktur penduduk Kabupaten Pidie didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu kelompok usia 15–64 tahun, yang mencapai lebih dari dua pertiga dari total penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pidie memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar. Dari sisi sosial ekonomi, mayoritas penduduk bekerja di sektor

pertanian, yang mencerminkan karakter wilayah Kabupaten Pidie sebagai daerah agraris. Meskipun demikian, kualitas hidup masyarakat terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie tahun 2023 sebesar 72,95. Namun, capaian ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi tantangan pembangunan daerah (BPS Kabupaten Pidie, 2023).

Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu penting di Kabupaten Pidie, terutama karena struktur ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian tradisional. Ketergantungan ini menyebabkan pendapatan rumah tangga miskin relatif tidak stabil dan rentan terhadap perubahan musim serta kondisi alam. Fakir miskin di Kabupaten Pidie umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan akses terhadap pekerjaan di luar sektor pertanian, serta kondisi perumahan yang belum sepenuhnya layak. Selain itu, masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki fasilitas sanitasi sendiri dan bergantung pada sumber air yang kurang aman. Rendahnya pengeluaran per kapita juga mencerminkan keterbatasan daya beli kelompok masyarakat miskin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Pidie tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap layanan dasar, sehingga memerlukan penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi (BPS Kabupaten Pidie, 2023).

#### **4.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Pidie**

Dinas Sosial Kabupaten Pidie merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial. Dinas ini berperan sebagai pelaksana kebijakan sosial pemerintah daerah yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan kelompok masyarakat rentan, seperti fakir miskin, lanjut usia, penyandang

disabilitas, dan keluarga kurang mampu. Keberadaan Dinas Sosial menjadi elemen penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Pidie (Kementerian Sosial RI, 2021).

Salah satu fungsi utama Dinas Sosial Kabupaten Pidie adalah melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi data masyarakat miskin melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS digunakan sebagai basis utama dalam penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbagai program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Proses pendataan ini dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan aparaturnya gampong, kecamatan, serta pendamping sosial guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat (Permensos No. 1 Tahun 2018).

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial Kabupaten Pidie berperan sebagai koordinator pelaksana di tingkat daerah. Dinas Sosial mengoordinasikan pendamping PKH, menjalin kerja sama dengan lembaga perbankan penyalur bantuan, serta berkolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Peran koordinatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan PKH berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkesinambungan, sesuai dengan tujuan program dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin (Kementerian Sosial RI, 2024).

Selain aspek penyaluran bantuan, Dinas Sosial juga berperan aktif dalam kegiatan pendampingan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Melalui pendamping PKH, Dinas Sosial memfasilitasi kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang berfokus pada peningkatan literasi keuangan, kesehatan, pendidikan anak, serta penguatan kapasitas ekonomi keluarga. Pendampingan ini merupakan upaya strategis untuk mendorong perubahan perilaku KPM agar tidak bergantung secara terus-menerus pada bantuan sosial,

melainkan mampu mencapai kemandirian ekonomi secara bertahap (Sofianto, 2020).

### 4.1.3 Karakteristik Informan

Karakteristik informan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan keadaan subjek penelitian yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan guna memahami hasil penelitian secara menyeluruh. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Pidie, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Pidie. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan dan penerimaan Program Keluarga Harapan, sehingga diharapkan mampu memberikan data yang relevan dan mendalam terkait penyaluran PKH serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi fakir miskin dalam perspektif pemberdayaan ekonomi Islam.

**Tabel 4. 1**  
**Karakteristik Informan**

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	Umur (Tahun)
1.	Irwan Syahputra	L	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	55
2.	Adiawan	L	Kepala Seksi Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	56
3.	Mahrizal	L	Pendamping PKH	39

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	Umur (Tahun)
4.	Samsiar	P	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH	57
5.	Ernita	P	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH	32
6.	Cut Sulastri	P	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH	46
7.	Yusliana	P	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH	54
8.	Iryani	P	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH	50
9.	Suryati	P	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH	56
10.	Nurasiah	p	KPM yang Dikeluarkan	43
11.	Rahmi	p	KPM yang Dikeluarkan	39

Sumber: Data Diolah (2026)

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam penelitian ini merupakan keluarga fakir miskin yang terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap enam orang KPM, dapat diketahui bahwa latar belakang keluarga penerima bantuan PKH sangat beragam, baik dari segi lama kepesertaan, kondisi ekonomi, maupun kebutuhan rumah tangga yang dihadapi sehari-hari. Sebagian besar informan menyampaikan bahwa mereka telah menerima bantuan PKH sejak beberapa tahun yang lalu. Ada KPM yang mulai menerima bantuan sejak sekitar tahun 2017–2018, sementara sebagian lainnya baru terdaftar sebagai penerima PKH pada tahun 2024. Lama waktu penerimaan bantuan ini

menunjukkan bahwa PKH tidak hanya menysasar keluarga miskin yang bersifat sementara, tetapi juga keluarga yang mengalami kondisi kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan pendapatan, pekerjaan tidak tetap, serta tingginya kebutuhan rumah tangga, khususnya bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah.

Dari sisi jenis bantuan, KPM menerima bantuan PKH dalam bentuk bantuan non-tunai yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan ini biasanya diterima secara bertahap dalam satu tahun dengan nominal yang berbeda-beda, tergantung pada komponen yang dimiliki oleh masing-masing keluarga, seperti anak yang masih bersekolah atau kondisi sosial ekonomi keluarga. Selain bantuan tunai, beberapa KPM juga menerima bantuan sembako yang berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan bahan pangan lainnya. Bantuan sembako tersebut sangat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, terutama ketika pendapatan keluarga sedang menurun. Pemanfaatan bantuan PKH oleh KPM pada umumnya difokuskan untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan utama. Sebagian besar informan menyatakan bahwa bantuan yang diterima digunakan untuk biaya pendidikan anak, seperti membeli perlengkapan sekolah, membayar kebutuhan sekolah, serta menunjang kebutuhan anak agar tetap bisa bersekolah. Selain itu, bantuan PKH juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sehari-hari, seperti membeli bahan makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Meskipun demikian, para KPM menyadari bahwa bantuan PKH tidak dapat sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan keluarga, melainkan hanya membantu meringankan beban ekonomi yang mereka rasakan.

Terkait dengan perubahan kondisi ekonomi, sebagian KPM menyatakan bahwa setelah menerima bantuan PKH, beban ekonomi keluarga menjadi sedikit lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Bantuan tersebut memberikan rasa aman,

terutama dalam hal pembiayaan pendidikan anak. Namun demikian, beberapa informan juga menyampaikan bahwa bantuan PKH belum mampu membawa perubahan besar terhadap kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh jumlah bantuan yang terbatas serta kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Oleh karena itu, bantuan PKH dipandang sebagai bantuan pendukung, bukan sebagai sumber penghasilan utama keluarga.

Dalam pelaksanaan PKH, peran pendamping juga menjadi bagian dari pengalaman KPM. Sebagian informan menyatakan bahwa pendamping PKH cukup membantu dalam memberikan informasi terkait jadwal pencairan bantuan, tata cara penggunaan kartu, serta penjelasan mengenai kewajiban sebagai penerima PKH. Pendamping juga berperan sebagai penghubung antara KPM dengan pihak terkait apabila terjadi kendala dalam pencairan bantuan. Namun, terdapat pula KPM yang merasa bahwa pendampingan belum dilakukan secara intensif dan umumnya hanya terjadi pada saat pertemuan tertentu atau ketika ada kegiatan yang diwajibkan. Selain menerima bantuan, sebagian besar KPM menyatakan pernah mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Kegiatan ini memberikan pengetahuan tambahan kepada KPM, terutama terkait pengelolaan keuangan keluarga, pentingnya pendidikan anak, serta pemahaman mengenai tujuan dan aturan dalam program PKH. Meskipun manfaat kegiatan P2K2 belum dirasakan secara langsung dalam peningkatan pendapatan keluarga, kegiatan ini dinilai cukup membantu dalam menambah wawasan dan kesadaran KPM mengenai pengelolaan kehidupan rumah tangga yang lebih baik.

Dari sisi nilai sosial, KPM pada umumnya merasakan adanya nilai kepedulian dan tolong-menolong dalam pelaksanaan PKH. Bantuan yang diterima dipandang sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat miskin. Beberapa KPM juga menyampaikan bahwa PKH

memberikan rasa keadilan sosial, karena bantuan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari pengalaman KPM dalam menerima dan menjalani program PKH di Kabupaten Pidie.

## **4.2 Pelaksanaan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie**

### **4.2.1 Proses Penetapan dan Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH**

Proses penetapan dan pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian, penetapan penerima PKH tidak dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah, melainkan mengikuti kebijakan dan sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana teknis yang memastikan data penerima sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Pendataan calon penerima PKH bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yaitu basis data nasional yang memuat informasi rumah tangga miskin dan rentan miskin. Data tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkat kesejahteraan atau desil, di mana keluarga yang berada pada desil terbawah menjadi prioritas penerima bantuan sosial, termasuk PKH. Selain faktor tingkat kesejahteraan, keluarga juga harus memenuhi komponen kepesertaan PKH, seperti memiliki anak usia sekolah, balita, ibu hamil, lansia, atau penyandang disabilitas.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kabupaten Pidie memiliki peran penting dalam proses validasi dan pembaruan data DTKS. Dinas Sosial bekerja sama dengan pendamping PKH serta aparat desa untuk memastikan bahwa data

yang tercantum dalam sistem sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Proses validasi ini dilakukan melalui pengecekan langsung di lapangan, baik dengan cara kunjungan rumah maupun melalui informasi yang diperoleh dari perangkat desa. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, seperti keluarga yang sudah tidak layak menerima bantuan namun masih terdaftar, maka Dinas Sosial dapat mengusulkan perbaikan data melalui mekanisme pembaruan DTKS.

Pendamping PKH memegang peranan strategis dalam proses pendataan dan penetapan KPM. Berdasarkan hasil wawancara, pendamping tidak hanya bertugas mendampingi KPM setelah bantuan diterima, tetapi juga terlibat aktif dalam proses verifikasi komponen PKH. Pendamping memastikan bahwa anak-anak dari keluarga penerima benar-benar masih bersekolah dan aktif mengikuti kegiatan belajar, serta memastikan ibu hamil dan balita memanfaatkan layanan kesehatan sesuai ketentuan program. Peran pendamping ini menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan realitas kehidupan KPM di lapangan. Selain pendamping PKH, aparat desa turut berperan dalam proses pendataan karena dianggap lebih mengetahui kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayahnya. Aparat desa biasanya memberikan rekomendasi atau informasi awal terkait keluarga yang dinilai layak atau tidak layak menerima bantuan. Namun, berdasarkan temuan penelitian, keterlibatan aparat desa masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme DTKS dan keterlambatan dalam mengusulkan pembaruan data. Kondisi ini menyebabkan masih adanya keluarga miskin yang belum terakomodasi sebagai penerima PKH.

Dari sudut pandang Keluarga Penerima Manfaat, persepsi terhadap proses pendataan PKH menunjukkan pandangan yang beragam. Sebagian besar KPM menyatakan bahwa mereka didata oleh petugas atau pendamping tanpa

mengetahui secara rinci tahapan dan mekanisme penetapan yang dilakukan. KPM umumnya menerima bantuan sebagai bentuk pertolongan dari pemerintah, tanpa banyak mempertanyakan proses administratif yang mendasarinya. Namun, terdapat pula KPM yang menilai bahwa proses pendataan belum sepenuhnya transparan, terutama ketika melihat adanya keluarga lain yang dianggap lebih mampu tetapi masih menerima bantuan, sementara keluarga yang kondisinya lebih memprihatinkan belum terdata. Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara administratif proses pendataan dan penetapan KPM PKH telah mengikuti prosedur yang berlaku, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan. Ketidaktepatan data, keterbatasan koordinasi antar pihak, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pendataan menjadi faktor yang memengaruhi ketepatan sasaran program. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendataan tidak hanya membutuhkan sistem yang baik, tetapi juga keterlibatan aktif dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, pendamping, aparat desa, dan masyarakat.

#### **4.2.2 Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Mekanisme penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penyaluran bantuan dilakukan secara non-tunai dan langsung disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui rekening masing-masing yang terhubung dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sistem penyaluran ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mengurangi potensi penyimpangan, serta memastikan bahwa bantuan diterima langsung oleh keluarga yang berhak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Pidie, penyaluran bantuan PKH tidak dilakukan setiap bulan, melainkan secara bertahap dalam satu tahun, umumnya sebanyak tiga hingga empat tahap. Besaran bantuan yang diterima oleh masing-masing KPM berbeda-beda, tergantung pada komponen kepesertaan yang dimiliki, seperti komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, tidak semua KPM menerima jumlah bantuan yang sama, karena bantuan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan keluarga penerima. Sebelum bantuan disalurkan, pendamping PKH memiliki peran penting dalam memastikan bahwa KPM masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Pendamping melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban KPM, seperti memastikan anak-anak tetap bersekolah, ibu hamil dan balita rutin memeriksakan kesehatan, serta lansia atau penyandang disabilitas mendapatkan perhatian sesuai ketentuan program. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka bantuan PKH dapat ditunda atau tidak disalurkan pada tahap tertentu. Mekanisme ini menunjukkan bahwa PKH tidak hanya bersifat bantuan tunai, tetapi juga mengandung unsur pembinaan dan pengawasan.

Dari sisi teknis pencairan, KPM biasanya menerima informasi mengenai jadwal pencairan bantuan melalui pendamping PKH atau aparat desa. Setelah dana masuk ke rekening, KPM dapat mencairkan bantuan melalui mesin ATM atau agen bank yang telah ditentukan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan KPM, tidak semua penerima mampu mencairkan bantuan secara mandiri. Sebagian KPM, terutama yang sudah lanjut usia atau kurang memahami penggunaan kartu ATM, membutuhkan bantuan pendamping atau anggota keluarga untuk melakukan pencairan dana. Selain bantuan tunai, beberapa KPM juga menerima bantuan sembako yang disalurkan melalui mekanisme tersendiri. Bantuan sembako umumnya diberikan dalam bentuk bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan lainnya. Penyaluran bantuan sembako

dilakukan melalui pihak penyalur yang telah ditunjuk dan biasanya diinformasikan terlebih dahulu kepada KPM. Bantuan sembako ini dinilai sangat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, terutama pada saat kondisi ekonomi keluarga sedang sulit.

Meskipun secara umum mekanisme penyaluran bantuan PKH telah berjalan sesuai dengan prosedur, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala. Berdasarkan keterangan KPM dan pendamping, kendala yang sering muncul antara lain keterlambatan pencairan bantuan, gangguan teknis pada kartu ATM, serta kurangnya pemahaman KPM mengenai jadwal dan tata cara pencairan bantuan. Dalam kondisi tertentu, KPM juga harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencairkan bantuan, sehingga menambah beban biaya dan waktu bagi mereka. Pendamping PKH berperan penting dalam membantu KPM mengatasi kendala tersebut. Pendamping memberikan informasi terkait jadwal pencairan, membantu menyelesaikan masalah administrasi, serta menjadi penghubung antara KPM dengan pihak bank atau Dinas Sosial apabila terjadi permasalahan. Namun, berdasarkan temuan penelitian, jumlah pendamping yang terbatas dibandingkan dengan jumlah KPM yang harus didampingi menyebabkan pendampingan belum dapat dilakukan secara optimal kepada seluruh penerima bantuan.

Dari perspektif KPM, mekanisme penyaluran bantuan PKH pada umumnya dinilai cukup membantu dan memudahkan, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. KPM menyadari bahwa bantuan yang diterima tidak bersifat tetap dan jumlahnya terbatas, namun bantuan tersebut tetap memberikan dampak positif dalam meringankan beban ekonomi keluarga. Bantuan PKH umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan konsumsi rumah tangga, serta keperluan mendesak lainnya.

### **4.2.3 Pendampingan dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)**

Pendampingan merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie. Program PKH tidak hanya dirancang sebagai bantuan tunai semata, tetapi juga sebagai upaya pembinaan dan pemberdayaan keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian secara bertahap. Dalam konteks ini, pendamping PKH memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tingkat lapangan (Rivelino & Muhardiansyah, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH, pendampingan dilakukan secara berkala kepada KPM, baik melalui pertemuan kelompok maupun kunjungan langsung ke rumah penerima bantuan. Pendamping bertugas memberikan informasi terkait program PKH, menjelaskan hak dan kewajiban KPM, serta memantau pemenuhan komitmen KPM terhadap komponen pendidikan dan kesehatan. Melalui pendampingan ini, pendamping memastikan bahwa anak-anak dari KPM tetap bersekolah, ibu hamil dan balita rutin memeriksakan kesehatan, serta keluarga memahami tujuan jangka panjang dari program PKH. Salah satu bentuk utama dari pendampingan PKH adalah pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). P2K2 merupakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku KPM dalam mengelola kehidupan keluarga. Berdasarkan temuan penelitian, kegiatan P2K2 di Kabupaten Pidie umumnya dilaksanakan secara kelompok dengan melibatkan KPM dalam satu wilayah atau desa tertentu. Pertemuan ini biasanya difasilitasi oleh pendamping PKH dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan P2K2 cukup beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan KPM. Beberapa materi yang sering dibahas antara lain pengelolaan keuangan keluarga, pentingnya pendidikan anak, kesehatan ibu dan anak, pola asuh dalam keluarga, serta pemahaman mengenai program PKH itu sendiri. Melalui kegiatan ini, KPM diharapkan tidak hanya menerima bantuan secara pasif, tetapi juga memperoleh pengetahuan yang dapat membantu mereka mengelola bantuan dengan lebih baik dan bijak. Dari sisi pendamping, pelaksanaan P2K2 dipandang sebagai sarana penting untuk membangun kesadaran dan perubahan perilaku KPM. Pendamping menyampaikan bahwa melalui pertemuan ini, KPM mulai memahami bahwa bantuan PKH bukan sekadar uang bantuan, tetapi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong keluarga miskin agar lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya. Namun demikian, pendamping juga mengakui bahwa efektivitas P2K2 sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan pemahaman KPM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPM, persepsi terhadap kegiatan P2K2 menunjukkan pandangan yang beragam. Sebagian KPM menyatakan bahwa mereka pernah mengikuti kegiatan P2K2 dan merasa memperoleh pengetahuan baru, terutama terkait pengelolaan keuangan rumah tangga dan pentingnya pendidikan anak. KPM menilai bahwa kegiatan tersebut cukup bermanfaat, meskipun belum sepenuhnya mampu mengubah kondisi ekonomi keluarga secara langsung. Bagi sebagian KPM, P2K2 lebih dipahami sebagai kegiatan penyuluhan dan pertemuan rutin daripada sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang nyata. Namun demikian, terdapat pula KPM yang mengaku jarang atau tidak rutin mengikuti kegiatan P2K2. Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi KPM antara lain keterbatasan waktu, kesibukan bekerja, jarak tempat tinggal dengan lokasi pertemuan, serta kurangnya pemahaman

mengenai manfaat jangka panjang dari kegiatan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun P2K2 telah dilaksanakan, tingkat kehadiran dan keterlibatan KPM masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.

Dari sisi pendamping, keterbatasan jumlah pendamping dibandingkan dengan jumlah KPM yang harus didampingi juga menjadi kendala tersendiri. Pendamping harus menangani banyak KPM dalam satu wilayah, sehingga intensitas pendampingan belum dapat dilakukan secara optimal kepada seluruh penerima bantuan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan P2K2 juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. Meskipun demikian, secara umum pendampingan dan pelaksanaan P2K2 di Kabupaten Pidie telah berjalan sesuai dengan ketentuan program PKH. Pendampingan berperan penting dalam membantu KPM memahami mekanisme program, memenuhi kewajiban sebagai penerima bantuan, serta memperoleh pengetahuan dasar mengenai pengelolaan keluarga. Kegiatan P2K2 menjadi sarana pembelajaran bagi KPM, meskipun dampaknya terhadap peningkatan ekonomi keluarga masih bersifat tidak langsung dan bertahap.

#### **4.3 Dampak Penyaluran PKH terhadap Kesejahteraan Ekonomi Fakir Miskin**

##### **4.3.1 Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak yang cukup nyata terhadap pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin di Kabupaten Pidie, meskipun dampaknya belum sepenuhnya mampu mengubah kondisi ekonomi keluarga secara signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, bantuan PKH lebih berfungsi sebagai penyangga ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan

dasar sehari-hari, terutama pada aspek pangan, pendidikan anak, dan akses layanan kesehatan.

a. Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Sandang, dan Tempat Tinggal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan PKH sangat dirasakan manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Sebagian besar KPM menyatakan bahwa bantuan tunai maupun bantuan sembako digunakan untuk membeli bahan makanan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan dapur lainnya. Meskipun jumlah bantuan yang diterima relatif terbatas dan tidak mencukupi seluruh kebutuhan keluarga, bantuan tersebut tetap membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, terutama pada kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Beberapa KPM menyampaikan bahwa bantuan sembako yang diterima secara berkala sangat membantu dalam menjaga ketersediaan pangan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa PKH berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga fakir miskin, meskipun sifatnya masih bersifat jangka pendek dan belum mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara permanen. Dari sisi sandang, bantuan PKH juga dimanfaatkan untuk membeli pakaian anak, terutama pakaian sekolah, sehingga anak-anak dapat bersekolah dengan perlengkapan yang lebih layak. Namun demikian, pada aspek tempat tinggal, dampak PKH masih tergolong terbatas. Berdasarkan temuan lapangan, bantuan PKH belum secara langsung digunakan untuk memperbaiki kondisi rumah atau tempat tinggal KPM. Hal ini disebabkan oleh besarnya kebutuhan biaya untuk perbaikan rumah yang tidak sebanding dengan jumlah bantuan yang diterima. Dengan demikian, PKH lebih berperan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dibandingkan peningkatan kualitas tempat tinggal.

b. Dampak PKH terhadap Akses Pendidikan Anak

Dampak paling menonjol dari penyaluran PKH dirasakan pada aspek pendidikan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan KPM, bantuan PKH sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti biaya perlengkapan sekolah, uang saku anak, dan kebutuhan penunjang lainnya. KPM menyatakan bahwa sebelum menerima bantuan PKH, mereka sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak, sehingga pendidikan anak menjadi kurang optimal. Dengan adanya PKH, orang tua menjadi lebih terdorong untuk memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah dan tidak putus sekolah. Pendamping PKH juga berperan dalam memantau kehadiran anak di sekolah sebagai bagian dari kewajiban penerima PKH. Temuan ini sejalan dengan keterangan pendamping PKH yang menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak sekolah dari keluarga penerima PKH relatif tinggi, bahkan mencapai lebih dari 90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa PKH berkontribusi positif dalam menjaga keberlangsungan pendidikan anak dari keluarga fakir miskin.

Meskipun demikian, sebagian KPM juga menyadari bahwa bantuan PKH belum mampu menutupi seluruh biaya pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, bantuan tersebut tetap memberikan dampak positif karena mengurangi beban biaya yang harus ditanggung keluarga. Dengan demikian, PKH berperan sebagai dukungan penting dalam meningkatkan akses pendidikan anak, meskipun belum sepenuhnya menjamin kualitas pendidikan secara menyeluruh.

#### c. Dampak PKH terhadap Akses Layanan Kesehatan

Pada aspek kesehatan, PKH juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses layanan kesehatan bagi KPM. Berdasarkan hasil wawancara, ibu hamil dan balita dari keluarga penerima manfaat menjadi lebih rutin memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan, seperti posyandu dan puskesmas. Hal ini tidak terlepas dari kewajiban yang melekat dalam program PKH, di mana

penerima bantuan diwajibkan untuk memenuhi komponen kesehatan sebagai syarat keberlanjutan bantuan.

Pendamping PKH berperan aktif dalam mengingatkan dan mendorong KPM untuk memanfaatkan layanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan balita. KPM menyatakan bahwa dengan adanya PKH, mereka merasa lebih terdorong untuk memperhatikan kesehatan keluarga, meskipun bantuan yang diterima tidak secara langsung digunakan untuk biaya pengobatan. Dampak PKH pada aspek kesehatan lebih terlihat pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan KPM terhadap layanan kesehatan dasar. Namun demikian, seperti halnya pada aspek lainnya, dampak PKH terhadap kesehatan masih bersifat tidak langsung. Bantuan PKH belum mampu sepenuhnya mengatasi keterbatasan biaya kesehatan yang lebih besar, terutama jika anggota keluarga mengalami sakit serius. Meskipun demikian, PKH tetap memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan akses dan kesadaran kesehatan keluarga fakir miskin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie, diketahui bahwa bantuan yang diterima sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, khususnya pada aspek pendidikan dan konsumsi rumah tangga. Informan pertama menyampaikan bahwa dana PKH digunakan untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah anak. Pada saat kondisi ekonomi keluarga belum stabil akibat penghasilan suami yang tidak menentu sebagai pekerja bangunan, bantuan tersebut menjadi penopang utama agar anak tetap dapat bersekolah tanpa harus mengalami putus sekolah.

Sementara itu, informan kedua mengungkapkan bahwa bantuan PKH membantu keluarga bertahan ketika hasil pertanian mengalami penurunan bahkan gagal panen. Bantuan yang diterima mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sehingga kebutuhan pokok tetap dapat terpenuhi. Temuan ini

menunjukkan bahwa PKH berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang efektif dalam mengurangi tekanan ekonomi keluarga fakir miskin, terutama dalam menjaga keberlangsungan akses pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

#### **4.3.2 Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pendapatan dan Aktivitas Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**

Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie memberikan dampak yang beragam terhadap pendapatan dan aktivitas ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan hasil penelitian, bantuan PKH belum mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara signifikan dalam arti menambah penghasilan tetap atau menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan. Sebagian besar KPM masih menggantungkan penghidupan pada pekerjaan informal dengan pendapatan yang tidak menentu, seperti buruh harian, petani kecil, dan pekerjaan serabutan lainnya. Dalam kondisi tersebut, bantuan PKH tidak dipandang sebagai sumber pendapatan utama, melainkan sebagai bantuan tambahan yang berfungsi untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun tidak meningkatkan pendapatan secara langsung, bantuan PKH memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kondisi keuangan keluarga. Dengan adanya bantuan PKH, sebagian beban pengeluaran rumah tangga dapat dikurangi, terutama untuk kebutuhan pangan dan pendidikan anak. Hal ini membuat pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan utama dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Beberapa KPM menyampaikan bahwa sebelum menerima bantuan PKH, mereka sering mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan rumah tangga, terutama ketika pendapatan menurun atau tidak menentu. Setelah menerima bantuan PKH, kondisi ekonomi keluarga

menjadi sedikit lebih stabil karena adanya tambahan dana yang dapat digunakan pada waktu-waktu tertentu.

Dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi, sebagian kecil KPM menyatakan bahwa bantuan PKH pernah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi sederhana, seperti berdagang kecil-kecilan atau membantu biaya operasional pekerjaan sehari-hari. Namun, aktivitas ekonomi tersebut umumnya bersifat sementara dan tidak berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Keterbatasan jumlah bantuan, minimnya modal, serta kurangnya keterampilan dan pendampingan usaha menjadi faktor utama yang menyebabkan bantuan PKH belum mampu mendorong munculnya usaha produktif yang berkelanjutan. Sebagian besar KPM lebih memprioritaskan penggunaan bantuan untuk kebutuhan konsumsi dan pendidikan anak dibandingkan untuk kegiatan usaha. Dari sisi stabilitas ekonomi rumah tangga, bantuan PKH memberikan dampak yang cukup penting bagi KPM. Bantuan tersebut memberikan rasa aman dan membantu keluarga menghadapi kondisi ekonomi yang rentan. KPM merasa lebih tenang dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, terutama pada saat pendapatan utama tidak mencukupi. Meskipun stabilitas ekonomi yang dirasakan bersifat sementara dan sangat bergantung pada keberlanjutan bantuan, PKH tetap berperan sebagai jaring pengaman sosial yang membantu keluarga fakir miskin bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Selain membantu kebutuhan konsumsi, hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan PKH juga memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi keluarga penerima manfaat. Informan pertama memanfaatkan sebagian dana bantuan sebagai tambahan modal untuk usaha kecil berupa jualan kue dan gorengan di rumah. Meskipun usaha tersebut masih berskala sederhana, namun telah memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Demikian pula informan kedua yang setelah menerima bantuan berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga dengan menanam sayuran tambahan selain padi dan menjual hasilnya di depan rumah. Upaya ini menunjukkan adanya perubahan perilaku ekonomi dari sekadar menerima bantuan menjadi lebih aktif dalam mencari tambahan penghasilan. Dengan demikian, PKH tidak hanya berdampak pada pengurangan beban pengeluaran, tetapi juga berpotensi mendorong kegiatan ekonomi produktif yang mendukung peningkatan pendapatan keluarga.

#### **4.3.3 Perubahan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Indikator Kesejahteraan**

Perubahan tingkat kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setelah menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui beberapa indikator kesejahteraan, terutama kondisi ekonomi rumah tangga, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta pandangan KPM terhadap kualitas hidup yang mereka rasakan. Berdasarkan hasil penelitian, perubahan kesejahteraan yang dialami KPM terjadi secara bertahap dan tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan keluarga secara signifikan. Meskipun demikian, PKH memberikan peran penting dalam menjaga kestabilan kehidupan ekonomi keluarga fakir miskin.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar KPM masih berada pada kelompok desil kesejahteraan bawah. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara struktural, tingkat kesejahteraan keluarga penerima PKH belum mengalami pergeseran yang besar ke kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi. Akan tetapi, beberapa KPM mulai merasakan perbaikan kondisi ekonomi dibandingkan sebelum menerima bantuan PKH, terutama dalam hal kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kerentanan ekonomi. Perubahan

posisi desil kesejahteraan lebih banyak terlihat pada berkurangnya tekanan ekonomi, bukan pada peningkatan pendapatan secara langsung. Jika dilihat dari perbandingan kondisi sebelum dan sesudah menerima PKH, KPM menggambarkan bahwa sebelum adanya bantuan PKH, mereka sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan kesehatan. Keterbatasan pendapatan membuat keluarga harus mengurangi pengeluaran, menunda pemenuhan kebutuhan penting, atau bergantung pada bantuan dari pihak lain. Setelah menerima PKH, beban ekonomi keluarga dirasakan menjadi lebih ringan. Bantuan yang diterima membantu keluarga mengatur keuangan rumah tangga dengan lebih baik, terutama pada saat kebutuhan meningkat seperti menjelang tahun ajaran baru atau ketika anggota keluarga membutuhkan layanan kesehatan.

Persepsi KPM terhadap kesejahteraan hidup juga mengalami perubahan setelah menerima bantuan PKH. Sebagian besar KPM menyampaikan bahwa mereka merasa lebih tenang dan memiliki rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasa aman tersebut tidak diukur dari peningkatan penghasilan, melainkan dari kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus terus-menerus berada dalam tekanan ekonomi. Bagi KPM, keberadaan bantuan PKH menjadi penopang yang membantu mereka bertahan dalam kondisi hidup yang terbatas. Di sisi lain, KPM juga menyadari bahwa bantuan PKH belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan hidup secara menyeluruh. Kondisi ekonomi keluarga masih terbatas dan belum memungkinkan terjadinya peningkatan taraf hidup yang signifikan. Dengan demikian, PKH lebih dirasakan sebagai bantuan yang menjaga kestabilan kehidupan keluarga daripada sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan secara cepat. Pandangan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan yang dirasakan KPM bersifat relatif dan sangat bergantung pada kondisi ekonomi keluarga sebelum menerima bantuan.

Perubahan kondisi ekonomi keluarga juga terlihat dari status kepesertaan kedua informan yang telah mengalami graduasi atau penghentian bantuan. Informan pertama berhenti menerima PKH pada tahun 2023 karena dinilai kondisi ekonominya telah membaik, sedangkan informan kedua tidak lagi menerima bantuan pada tahun 2024 akibat perubahan data dan peningkatan penghasilan keluarga. Meskipun pada awalnya terdapat rasa khawatir saat bantuan dihentikan, keduanya menyadari bahwa kondisi ekonomi mereka telah mengalami perbaikan dibandingkan sebelum menerima PKH.

Jika dianalisis berdasarkan indikator kesejahteraan, terdapat peningkatan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengelola keuangan, serta mengembangkan aktivitas ekonomi sederhana. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran tingkat kesejahteraan dari kondisi sangat rentan menuju kondisi yang lebih stabil secara ekonomi. Dengan demikian, PKH telah berkontribusi dalam mendorong perubahan kesejahteraan keluarga penerima manfaat secara bertahap.

#### **4.4 PKH dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Islam**

##### **4.4.1 Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Pelaksanaan PKH**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dipahami tidak hanya sebagai kebijakan sosial yang bersifat administratif, tetapi juga sebagai praktik yang sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan sosial idealnya mengandung dimensi etika dan moral yang menekankan keadilan, kepedulian sosial, serta tanggung jawab dalam pengelolaan amanah. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam menilai sejauh mana program bantuan sosial mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat fakir miskin.

Nilai keadilan (al-'adl) dalam Islam menekankan pentingnya perlakuan yang proporsional dan tidak diskriminatif terhadap seluruh lapisan masyarakat,

khususnya kelompok yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Keadilan dalam konteks kebijakan sosial tidak hanya dimaknai sebagai pembagian bantuan secara merata, tetapi juga memastikan bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Kajian ekonomi Islam kontemporer menjelaskan bahwa prinsip al-‘adl bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui mekanisme distribusi yang adil, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan maqashid al-syariah, terutama dalam menjaga harta dan keberlangsungan hidup masyarakat miskin Amin, D. (2025).

Selain keadilan, nilai tolong-menolong (ta’awun) juga menjadi prinsip utama dalam Islam yang relevan dengan pelaksanaan PKH. Konsep ta’awun mengajarkan pentingnya kerja sama dan solidaritas sosial dalam membantu sesama, khususnya mereka yang berada dalam kondisi sulit. Dalam berbagai kajian ekonomi Islam modern, ta’awun dipandang sebagai bentuk kepedulian kolektif yang mendorong masyarakat untuk saling mendukung demi terciptanya kesejahteraan bersama. Penerapan prinsip ini dalam kebijakan sosial tercermin dari upaya negara dan masyarakat dalam memberikan dukungan kepada keluarga miskin agar mampu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara bertahap (Susanto et al., 2023).

Nilai amanah dan tanggung jawab juga memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Amanah dalam Islam mencerminkan kepercayaan yang harus dijalankan dengan jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab. Nilai ini berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKH, baik pengelola program, pendamping, maupun Keluarga Penerima Manfaat. Kajian Islam kontemporer menegaskan bahwa amanah tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa bantuan

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Albina, M., & Maulida, S. A. (2025).

#### **4.4.2 PKH sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial semata, tetapi juga dipandang sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat, terutama dalam konteks masyarakat miskin dan rentan di Indonesia. Sebagai program bersyarat yang dirancang untuk membantu keluarga kurang mampu, PKH berupaya menciptakan perubahan yang lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan dasar; program ini diharapkan mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bergerak dari ketergantungan bantuan menuju arah yang lebih mandiri secara ekonomi.

Penggunaan bantuan sosial melalui PKH kerap dipandang sebagai bentuk penyelamatan awal bagi KPM dari kondisi ekonomi yang sangat rentan. Dengan adanya bantuan ini, keluarga miskin dapat lebih dulu mengatasi kebutuhan mendesak, sehingga secara psikologis mereka tidak selalu berada dalam posisi bertahan hidup yang tertekan. Dalam beberapa studi kajian ekonomi Islam, PKH dinilai memiliki efek positif terhadap kemampuan KPM untuk mulai memikirkan langkah-langkah produktif dalam kehidupan ekonomi mereka, walaupun perubahan signifikan tersebut belum menjadi suatu penghasilan yang stabil pada awalnya. Studi di beberapa daerah menunjukkan bahwa PKH dapat mendorong keluarga untuk melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik dan memperhatikan peluang peningkatan ekonomi mereka secara bertahap (Dhoifullah, A., & Kamarni, N., 2024).

Perubahan dari sekadar ketergantungan pada bantuan menjadi kemandirian ekonomi membutuhkan waktu dan pendampingan yang berkelanjutan. Pendampingan sosial yang merupakan bagian dari PKH berupaya

memberi wawasan kepada KPM mengenai pentingnya penggunaan bantuan secara optimal, termasuk untuk menjaga pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta peluang kegiatan ekonomi produktif. Dalam kajian ekonomi Islam modern, usaha untuk meningkatkan etos kerja dan kewirausahaan di kalangan masyarakat miskin menjadi komponen penting dari pemberdayaan umat. Nilai Islam yang mengajarkan bahwa bekerja dan berusaha merupakan bagian dari ibadah turut memperkuat pendekatan pemberdayaan dalam PKH, sehingga program ini dapat dimaknai sebagai upaya menginternalisasi semangat kerja yang produktif dalam kehidupan masyarakat miskin (Lorenza et al., 2025).

Selain itu, relevansi PKH dengan nilai-nilai maqashid syariah juga menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa program ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga selaras dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara teori, maqashid syariah menekankan pada tujuan untuk menjaga jiwa, keturunan, akal, dan harta umat secara adil dan berkelanjutan. Dalam beberapa kajian, PKH dipandang telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ini karena melalui bantuan yang diberikan, keluarga miskin dapat tetap menjaga kesehatan, melanjutkan pendidikan anak, serta mempertahankan keberlangsungan hidup secara layak. Dengan demikian, ketika program ini diimplementasikan secara tepat dan disertai pemahaman yang cukup oleh KPM, PKH dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan sesuai dengan maqashid syariah. (Munir, R., & Anisah, A., 2024)

#### **4.4.3 Pandangan Fakir Miskin terhadap PKH dalam Perspektif Islam**

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya memandang bantuan ini sebagai transfer dana ekonomi biasa, tetapi juga melalui sudut pandang religius yang dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai Islam yang mereka anut. Dalam wawancara lapangan di Kabupaten Pidie, banyak KPM menyampaikan bahwa bantuan PKH merupakan bentuk pertolongan nyata

dari pemerintah yang membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar keluarga, terutama kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan. Sebagian besar informan mengungkapkan rasa syukur mereka atas keberadaan PKH, karena bantuan ini membantu meringankan beban hidup sehari-hari tanpa mengurangi martabat mereka sebagai hamba Allah SWT, yang seharusnya tidak hanya menerima bantuan tetapi juga berikhtiar melalui usaha dan kerja keras.

Pemahaman religius terhadap bantuan PKH di kalangan KPM dapat terlihat dari bagaimana mereka mengaitkan keberhasilan pemenuhan kebutuhan keluarga dengan usaha mereka sendiri, serta keyakinan bahwa setiap rezeki adalah amanah dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan dengan bijak. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian lain, pemahaman masyarakat yang baik terhadap kewajiban sebagai penerima bantuan dalam kerangka syariat membuat mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan dana PKH sesuai dengan tujuan program, misalnya untuk pendidikan anak, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga tanpa bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Halim *et al.*, 2024).

KPM merasa bahwa sikap syukur atas keberadaan PKH merupakan respons religius yang penting, karena syukur dalam Islam tidak hanya berarti berterima kasih secara verbal tetapi juga digunakan secara bertanggung jawab. Hal ini tercermin pada pengakuan informan yang menggunakan bantuan PKH untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara halal serta menghindari penggunaan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Misalnya, sebagian KPM dalam wawancara menyatakan bahwa mereka memastikan bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan yang jelas seperti biaya sekolah anak, kebutuhan kesehatan, dan konsumsi yang halal serta tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Ini menunjukkan bahwa nilai Islam seperti tanggung jawab dalam menggunakan bantuan menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai umat Muslim.

Pandangan tentang ikhtiar juga menonjol di antara responden. Mereka memaknai bantuan PKH bukan sebagai sesuatu yang membuat malas, tetapi sebagai alat bantu untuk memulai atau mempertahankan usaha ekonomi rumah tangga yang lebih baik. Meskipun tidak semua KPM langsung memiliki usaha produktif besar, banyak yang memanfaatkan bantuan PKH untuk mengatur keuangan keluarga sehingga memberi ruang untuk mencari peluang pekerjaan tambahan atau mempertahankan usaha kecil yang sudah mereka jalankan. Pemahaman ini selaras dengan prinsip Islam yang mendorong umat untuk berikhtiar sambil tetap bergantung kepada Allah, bahwa setiap usaha untuk memperbaiki kondisi hidup merupakan bagian dari ibadah jika diniatkan dengan baik. Selaras dengan perspektif maqashid syariah yang menekankan perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama, bantuan PKH dipandang oleh KPM sebagai sarana yang membantu mereka menjalankan fungsi keluarga secara layak di tengah tekanan ekonomi. Penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi PKH memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang sesuai dengan tujuan maqashid syariah, termasuk memberikan akses pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan kehidupan yang layak bagi keluarga miskin. (Dhoifullah, A., & Kamarni, N., 2024)

Selain itu, meskipun peran ulama atau tokoh agama dalam pendampingan penggunaan bantuan masih relatif terbatas, beberapa KPM menyatakan bahwa mereka mengambil pedoman Islam secara mandiri dalam menggunakan dana bantuan PKH, seperti memastikan bahwa belanja yang dilakukan adalah untuk hal yang halal dan bermanfaat bagi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa nilai moral dan etika Islam turut membentuk sikap mereka terhadap bantuan tersebut, sehingga penggunaan bantuan PKH dipandang bukan hanya sebagai pemberian ekonomi tetapi juga sebagai bagian dari proses hidup yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan Islam Syaukani, M., 2023).

## **4.5 Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan PKH di Kabupaten Pidie**

### **4.5.1 Hambatan Administratif dan Teknis dalam Pelaksanaan PKH di Kabupaten Pidie**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie tidak terlepas dari berbagai hambatan administratif dan teknis yang memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hambatan ini muncul pada tahap awal pendataan hingga pada proses pencairan bantuan, sehingga berpotensi mengurangi manfaat program bagi keluarga fakir miskin. Berdasarkan hasil wawancara dengan KPM serta penjelasan dalam dokumen penelitian, permasalahan yang paling sering ditemui berkaitan dengan ketepatan data penerima, keterlambatan pencairan bantuan, serta kendala akses terhadap layanan perbankan.

Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Beberapa KPM dalam wawancara menyampaikan bahwa masih terdapat keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi tercatat sebagai penerima PKH, sementara keluarga yang kondisinya lebih membutuhkan justru belum terdaftar. Kondisi ini berkaitan erat dengan mekanisme pendataan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bersifat administratif dan sangat bergantung pada pembaruan data dari tingkat desa. Dalam praktiknya, proses pemutakhiran data sering mengalami keterlambatan, baik karena keterbatasan sumber daya aparatur desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan perubahan kondisi ekonomi, maupun lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Akibatnya, data yang digunakan dalam penetapan KPM tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa validitas data DTKS masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial di Indonesia. Data yang tidak diperbarui secara berkala berpotensi menyebabkan

kesalahan sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat, terutama di lingkungan pedesaan yang memiliki kedekatan sosial yang tinggi (Sari & Putra, 2022). Dalam konteks Kabupaten Pidie, kondisi ini juga dirasakan oleh KPM yang menyatakan adanya perasaan tidak adil ketika melihat penerima bantuan yang dianggap lebih mampu secara ekonomi.

Selain persoalan data, keterlambatan pencairan bantuan juga menjadi hambatan teknis yang sering dikeluhkan oleh KPM. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa KPM menyampaikan bahwa bantuan PKH tidak selalu cair sesuai jadwal yang telah diinformasikan. Keterlambatan ini berdampak langsung pada kondisi ekonomi rumah tangga, terutama bagi keluarga yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan. Ketika bantuan terlambat diterima, keluarga harus mencari alternatif lain seperti berutang atau menunda pemenuhan kebutuhan penting. Keterlambatan pencairan ini umumnya disebabkan oleh faktor teknis di tingkat pusat maupun daerah, seperti proses administrasi yang panjang, kendala sistem penyaluran non-tunai, serta koordinasi antara kementerian, dinas sosial daerah, dan lembaga penyalur. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial berbasis sistem perbankan dan digital masih menghadapi tantangan teknis, terutama di daerah yang infrastruktur dan literasi digitalnya belum optimal (Rahman & Hidayat, 2021).

Hambatan administratif dan teknis lainnya adalah kendala akses perbankan, terutama bagi KPM yang tinggal di wilayah pedesaan atau daerah yang jauh dari pusat layanan bank. Berdasarkan keterangan KPM dalam wawancara, sebagian dari mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai kantor bank atau agen penyalur bantuan. Kondisi ini tidak hanya membutuhkan biaya tambahan, tetapi juga menyulitkan KPM lanjut usia atau KPM yang memiliki keterbatasan fisik. Selain itu, keterbatasan pemahaman KPM

terhadap prosedur perbankan, seperti penggunaan kartu ATM atau rekening, turut memperumit proses pencairan bantuan. Kendala akses perbankan ini menunjukkan bahwa meskipun penyaluran bantuan secara non-tunai bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, implementasinya di lapangan masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Studi tentang bantuan sosial non-tunai menyebutkan bahwa rendahnya literasi keuangan masyarakat miskin menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi program bantuan berbasis perbankan (Yuliana et al., 2023).

#### **4.5.2 Hambatan Sosial dan Kultural dalam Pelaksanaan PKH di Kabupaten Pidie**

Selain hambatan administratif dan teknis, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie juga menghadapi berbagai hambatan sosial dan kultural yang memengaruhi efektivitas program dalam jangka panjang. Hambatan ini berkaitan dengan pola pikir, kebiasaan, serta kondisi sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terbentuk dari pengalaman kemiskinan struktural dan ketergantungan bantuan sosial dalam waktu yang cukup lama. Berdasarkan hasil wawancara dengan KPM serta pengamatan lapangan, hambatan sosial dan kultural yang paling menonjol meliputi kecenderungan ketergantungan terhadap bantuan, rendahnya literasi keuangan, serta partisipasi KPM yang belum optimal dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Salah satu hambatan sosial yang cukup kuat adalah munculnya sikap ketergantungan terhadap bantuan PKH. Beberapa KPM dalam wawancara menyampaikan bahwa bantuan PKH telah menjadi bagian penting dalam perencanaan ekonomi rumah tangga mereka. Kondisi ini menyebabkan sebagian KPM cenderung menunggu bantuan cair untuk memenuhi kebutuhan tertentu,

terutama kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Ketergantungan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh sikap pasif KPM, melainkan oleh kondisi ekonomi yang sangat terbatas serta minimnya alternatif sumber penghasilan yang stabil. Dalam jangka panjang, pola ketergantungan ini berpotensi melemahkan tujuan PKH sebagai program yang mendorong kemandirian dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

Fenomena ketergantungan bantuan ini juga ditemukan dalam berbagai penelitian sosial yang menyebutkan bahwa bantuan sosial yang bersifat rutin dan jangka panjang dapat membentuk pola pikir “menunggu bantuan” apabila tidak disertai dengan program pemberdayaan yang kuat dan berkelanjutan. Penelitian oleh Wahyuni dan Arifin (2022) menunjukkan bahwa masyarakat miskin cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan jangka pendek dibandingkan perencanaan ekonomi jangka panjang, sehingga bantuan sosial sering dipersepsikan sebagai sumber penopang utama, bukan sebagai stimulus untuk bangkit secara mandiri. Hambatan sosial berikutnya adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan KPM. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar KPM belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga, seperti perencanaan anggaran, pemisahan kebutuhan dan keinginan, serta pemanfaatan dana untuk kegiatan produktif. Bantuan PKH umumnya langsung digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, tanpa perencanaan keuangan yang terstruktur. Kondisi ini menyebabkan bantuan cepat habis dan tidak memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Rendahnya literasi keuangan ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan KPM yang relatif rendah serta minimnya pengalaman dalam mengelola keuangan secara formal. Penelitian oleh Lestari dan Nurhasanah (2023) menyebutkan bahwa literasi keuangan masyarakat miskin masih menjadi tantangan besar dalam

pelaksanaan program bantuan sosial, karena tanpa pemahaman yang cukup, bantuan cenderung bersifat konsumtif dan tidak mampu mendorong kemandirian ekonomi. Temuan ini sejalan dengan kondisi KPM di Kabupaten Pidie yang lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan mendesak dibandingkan investasi ekonomi jangka panjang.

Selain itu, partisipasi KPM dalam kegiatan P2K2 juga menjadi tantangan sosial yang cukup signifikan. Meskipun P2K2 dirancang sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan keluarga, tidak semua KPM mengikuti kegiatan ini secara rutin dan aktif. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa KPM menyatakan bahwa keterbatasan waktu, kelelahan bekerja, serta anggapan bahwa kegiatan P2K2 kurang memberikan manfaat langsung menjadi alasan utama rendahnya partisipasi. Ada pula KPM yang mengikuti kegiatan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tanpa benar-benar memahami materi yang disampaikan. Rendahnya partisipasi ini menunjukkan adanya hambatan kultural berupa pola pikir pragmatis, di mana KPM lebih tertarik pada bantuan yang bersifat langsung dan nyata dibandingkan kegiatan pembinaan yang hasilnya tidak segera dirasakan. Penelitian oleh Fauzi dan Rahmawati (2024) menjelaskan bahwa efektivitas program pendampingan sosial sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental dan kesadaran peserta, sehingga tanpa pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat, kegiatan pemberdayaan seperti P2K2 sulit mencapai hasil yang optimal.

#### **4.6 Pembahasan Hasil Penelitian**

Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan kerangka teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta dampaknya terhadap

kesejahteraan ekonomi fakir miskin di Kabupaten Pidie. Pembahasan ini tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga menempatkan temuan penelitian dalam konteks keilmuan, khususnya teori kesejahteraan dan konsep pemberdayaan ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran PKH di Kabupaten Pidie terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama pada aspek pendidikan anak dan akses layanan kesehatan. Temuan ini sejalan dengan teori kesejahteraan sosial yang menyatakan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, PKH berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang mampu menjaga stabilitas hidup keluarga fakir miskin, meskipun belum sepenuhnya mendorong peningkatan pendapatan secara signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar KPM masih berada pada kelompok kesejahteraan bawah, namun mengalami perbaikan kondisi dibandingkan sebelum menerima PKH. Perbaikan tersebut lebih dirasakan dalam bentuk berkurangnya tekanan ekonomi dan meningkatnya rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Temuan ini memperkuat pandangan dalam teori kesejahteraan bahwa program bantuan sosial memiliki peran penting sebagai *safety net* bagi kelompok rentan, terutama dalam konteks masyarakat dengan tingkat pendapatan yang tidak stabil. Dengan demikian, keberhasilan PKH tidak dapat hanya dinilai dari perubahan tingkat pendapatan, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kualitas hidup dasar masyarakat miskin.

Jika ditinjau dari perspektif pemberdayaan ekonomi Islam, pelaksanaan PKH di Kabupaten Pidie menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai dasar Islam

seperti keadilan (al-'adl), tolong-menolong (ta'awun), amanah, serta tanggung jawab sosial. Temuan lapangan menunjukkan bahwa KPM memandang bantuan PKH sebagai amanah yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan halal, terutama untuk kepentingan pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Sikap syukur, ikhtiar, dan kesadaran akan tanggung jawab dalam menggunakan bantuan mencerminkan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan KPM. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam mewujudkan PKH sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendorong kemandirian. Ketergantungan sebagian KPM terhadap bantuan, rendahnya literasi keuangan, serta partisipasi yang belum optimal dalam kegiatan P2K2 menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam konsep pemberdayaan ekonomi Islam, bantuan seharusnya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas ekonomi umat agar mampu berdiri secara mandiri. Temuan ini mengindikasikan bahwa PKH di Kabupaten Pidie masih lebih dominan berperan sebagai program perlindungan sosial dibandingkan sebagai program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan berbagai studi yang menyatakan bahwa PKH efektif dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, tetapi memiliki keterbatasan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi KPM. Beberapa penelitian terdahulu juga menemukan bahwa keberhasilan PKH sangat bergantung pada kualitas pendampingan dan sinergi dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya. Perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada penekanan perspektif ekonomi Islam, di mana penelitian ini menyoroti bagaimana nilai-nilai religius membentuk sikap KPM dalam memaknai dan memanfaatkan bantuan PKH. Selain itu, penelitian ini

memberikan gambaran kontekstual mengenai kondisi sosial dan kultural masyarakat Kabupaten Pidie yang memengaruhi pelaksanaan PKH. Nilai-nilai religius yang kuat di tengah masyarakat Aceh menjadi faktor pendukung dalam menjaga penggunaan bantuan secara halal dan bertanggung jawab. Di sisi lain, kondisi ekonomi yang terbatas dan rendahnya literasi keuangan menjadi faktor penghambat dalam mendorong transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian ekonomi. Temuan ini memperkaya khazanah penelitian tentang PKH dengan menunjukkan bahwa faktor budaya dan religius memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan program bantuan sosial.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat teori kesejahteraan yang menempatkan bantuan sosial sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas hidup kelompok miskin, sekaligus menegaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup rasa aman dan keberlanjutan hidup. Dari perspektif ekonomi Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa PKH memiliki relevansi dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa, akal, dan harta, meskipun masih memerlukan penguatan agar mampu mendorong perlindungan dan pengembangan harta secara lebih produktif.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan pendampingan PKH yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada peningkatan kapasitas ekonomi dan literasi keuangan KPM. Program P2K2 perlu dioptimalkan sebagai sarana edukasi yang lebih kontekstual dan aplikatif sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, diperlukan sinergi antara PKH dan program pemberdayaan ekonomi lainnya, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan usaha mikro, agar tujuan kemandirian ekonomi dapat tercapai secara bertahap.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Pelaksanaan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie**

Pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, mulai dari tahap pendataan melalui DTKS, verifikasi dan validasi calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penetapan penerima bantuan, hingga proses penyaluran dana secara non-tunai melalui lembaga perbankan. Dinas Sosial Kabupaten Pidie bersama pendamping PKH berperan aktif dalam memastikan bantuan tersalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, serta melakukan pendampingan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Secara umum, pelaksanaan PKH di Kabupaten Pidie telah berjalan cukup efektif dalam aspek administratif dan teknis. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan seperti keterlambatan pencairan, keterbatasan literasi keuangan penerima manfaat, serta kendala dalam pemutakhiran data. Meskipun begitu, dari sisi implementasi lapangan, PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan tunai, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan sosial melalui pendampingan yang mendorong perubahan perilaku dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga.

### **5.1.2 Dampak Penyaluran PKH terhadap Kesejahteraan Fakir Miskin di Kabupaten Pidie**

Penyaluran PKH memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan fakir miskin di Kabupaten Pidie, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan anak, layanan kesehatan ibu dan balita, serta kebutuhan pokok rumah tangga. Bantuan yang diterima mampu meringankan beban pengeluaran keluarga sehingga membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga miskin. Selain itu, dalam beberapa kasus, bantuan PKH juga dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha kecil sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Dari perspektif pemberdayaan ekonomi Islam, program ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial (al-'adl), tolong-menolong (ta'awun), dan kemaslahatan umat, karena tidak hanya memberikan bantuan konsumtif tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi secara bertahap. Meskipun dampaknya belum sepenuhnya mengangkat seluruh penerima keluar dari garis kemiskinan, PKH terbukti membantu meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan ekonomi keluarga fakir miskin secara bertahap dan berkelanjutan.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Dinas Sosial Kabupaten Pidie

Diharapkan dapat terus meningkatkan akurasi data penerima bantuan melalui pemutakhiran DTKS secara berkala, serta memperkuat koordinasi dengan aparat desa agar penyaluran bantuan PKH semakin tepat sasaran. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meminimalkan keterlambatan

pencairan bantuan dan memperbaiki akses layanan perbankan bagi KPM, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau.

2. Bagi Pendamping PKH

Pendamping diharapkan dapat lebih mengoptimalkan peran pendampingan, terutama dalam kegiatan P2K2, dengan pendekatan yang lebih persuasif dan kontekstual sesuai kondisi sosial ekonomi KPM. Pendamping juga perlu mendorong KPM agar tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu memanfaatkan PKH sebagai motivasi untuk meningkatkan usaha dan pendapatan keluarga.

3. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

KPM diharapkan dapat memanfaatkan bantuan PKH secara bijak dan bertanggung jawab, serta menjadikan bantuan tersebut sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga secara berkelanjutan. Kesadaran untuk berikhtiar dan meningkatkan kemandirian ekonomi perlu terus ditumbuhkan agar tujuan jangka panjang PKH dapat tercapai.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam ruang lingkup dan jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji pelaksanaan PKH dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya melalui metode kuantitatif atau kombinasi metode, serta menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainulyaqin, M., Haromain, Y., & Latifah, N. (2023). Peran program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 11(1), 23–34.
- Albina, M., & Maulida, S. A. (2025). Amanah Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Nilai-Nilai Islam. *SCHOLARS: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(1), 28-41.
- Alt-Hessenbruch, M. (2022). Data Presentation in Qualitative Research: The Outcomes of the Pattern of Ideas with the Raw Data. *International Journal of Qualitative Research*, 1(3), 196–200.
- Amin, D. (2025). *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam sebagai Solusi untuk Ketimpangan Sosial di Indonesia*. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(4), 59–71.
- Azizah, P. N., & Prathama, A. (2024). Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 7(2), 233–245.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Pidie 2023*. Sigli: BPS Kabupaten Pidie.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2023). *Profil kemiskinan di Provinsi Aceh Maret 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. (2023). *Kabupaten Pidie dalam Angka 2023*. Sigli: BPS Kabupaten Pidie.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2024). *Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Aceh, 2020–2024*. Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2024*. BPS Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. (2025). *Kabupaten Pidie dalam angka 2025*. Sigli: BPS Kabupaten Pidie.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2022). *Strategi nasional penanggulangan kemiskinan*. Jakarta: Bappenas.
- Bustamam, N., Yulyanti, S., & Dewi, K. S. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indikator kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(1), 85–92.
- Chapra, M. U. (2021). *The Islamic vision of development in the light of Maqashid al-Shariah*. Jeddah: IRTI–IsDB.
- Chand, S. P. (2025). Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interviews, Focus Groups, Observations, and Document Analysis. *Advances in Educational Research and Evaluation*, 6(1), 303–317.
- Dhoifullah, A., & Kamarni, N. (2024). *Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin berbasis maqashid syariah di Kota Padang*. *Journal of Education Research*, 5(4), 5026–5041.
- Dr. Umar Sidiq, M. A. g., & Dr. Moh. Miftachul Choiri. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian. *Humanika*, 21(1), 33-54
- Fauzi, M., & Rahmawati, D. (2024). Efektivitas pendampingan sosial dalam Program Keluarga Harapan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 23–38.

- Fitrayani. (2025). *Integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik manajemen bisnis modern*. Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 16(1), 1–13. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Gorahe, L. V., Waani, F., & Tasik, F. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Eksekutif*, 1(1), 1–9. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi.
- Halim, S., Desminar, Mursal, Yanti, E. R., & Dilena, R. (2024). Community understanding of obligations as a recipient of PKH assistance in the perspective of Islamic law. *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 6(2), 325–342.
- Hasniati, H., Mutia, R. N., & Annisa, A. (2021). Pemberdayaan ekonomi umat melalui peningkatan produksi dalam sistem ekonomi Islam. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 17–26.
- Hasniati, H., Nurul, F., & Rahman, A. (2021). Pemberdayaan ekonomi umat berbasis maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 145–158.
- Hidayatingsih, N., & Sofa, A. R. (2025). Implementasi pendidikan karakter Islami dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat pedesaan: Studi kasus di Desa Dawuhan. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 11–25. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.494>.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2021). *Ekonomi pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Kamariani, B. D., Asbarini, N. F. E., Ridwan, A., & Rahman, A. C. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Journal of Administrative and Social Science (JASS)*, 205–219. <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.929>

- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kemensos RI. *Administrative and Social Science (JASS)*,
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). *Petunjuk Teknis Program Keluarga Harapan Tahun 2024*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementerian Sosial RI. (2025). *Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Diakses 9 September 2025 dari <https://kemensos.go.id/>
- Latare, S., Harold, R., Bumulo, S., & Ali, A. (2023). Dampak Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan di Desa Bangga Kecamatan Paguyaman Pantai The impact of the Family Hope Program in poverty alleviation in Bangga Village, Paguyaman Pantai District]. *Dynamics of Rural Society Journal*, 1(1), 10–19.
- Lestari, P., & Nurhasanah, S. (2023). Literasi keuangan masyarakat miskin dalam program bantuan sosial pemerintah. *Jurnal Ekonomi Sosial dan Humaniora*, 4(2), 155–170.
- Lorenza, D. W., Hak, N., & Hasanah, U. (2025). Tinjauan ekonomi Islam terhadap konsep Program Keluarga Harapan (PKH) dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi umat di Desa Lubuk Unen Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(4), 2362–2377.

- Munir, R., & Anisah, A. (2024). *Peranan Dana Bantuan Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat: Kajian Hukum Ekonomi Syari'ah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–9.
- OECD. (2022). *Social protection and poverty reduction in developing countries*. Paris: OECD Publishing.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2021). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 48(6), 1–12.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Permatasari, G. (2024). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kediri. *Jurnal Innovant*, 5(2), 45–56.
- Qardhawi, Y. (2022). *Fiqh al-zakah* (edisi revisi). Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rivelino, R., & Muhandiansyah, M. (2023). Implementation of the Keluarga Harapan Program Policy in Aceh Singkil Regency. *Journal of Digitainability, Realism & Mastery*, 2(08), 33–49.
- Sari, D. P., Astuti, W., & Dzulfikry, N. (2023). Indikator dan tingkat keluarga sejahtera menurut Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas. *Ekodestinas: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata*, 1(1), 47–54.
- Sarif, S., Ali, N. A., & Kamri, N. (2024). Zakat for generating sustainable income: An emerging mechanism of productive distribution. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2312598. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2312598>
- Sofianto, A. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 35–49.

- Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 14–31.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Yogyakarta: Penerbit Metopen.
- Suharto, E. (2021). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sultan, S., Rahayu, H. C., & Purwiyanta, P. (2023). Analisis kesejahteraan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(1), 77–85.
- Susanto, F., Rachmad, D., & Yusuf, A. M. (2023). Optimalisasi program ta'awun dalam pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. *PJIEFAS: Postgraduate Journal of Islamic Economics, Finances and Accounting Studies*, 2(2), 217–259.
- Syaukani, M. (2023). *Analisis maqashid syariah terhadap sistem jaminan sosial dalam Program Keluarga Harapan*. *Ameena Journal*, 1(3), 32.
- Wahyuni, S., & Arifin, Z. (2022). Ketergantungan bantuan sosial dan perilaku ekonomi rumah tangga miskin. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 89–104.
- Wijaya, F. R., Lubis, F. A. R., Siregar, M. N. S., & Batubara, A. A. F. (2025). *Sumber data, subjek penelitian, dan isu terkait*. *Jurnal Edukatif*, 3(2), 271–276.
- Yasin, R., & Aris, M. R. (2023). *Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas*. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, 2(11), 1112–1121.

Zahran, W. S. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin di Kabupaten Bekasi. *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 102–112. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4468>



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara Informan

#### Informan: Dinas Sosial Kabupaten Pidie

No	Fokus Pertanyaan	Pertanyaan Wawancara
1	Kondisi fakir miskin	Bagaimana gambaran umum kondisi fakir miskin di Kabupaten Pidie berdasarkan data dan pengamatan Dinas Sosial?
2	Peran institusi	Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Pidie dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)?
3	Mekanisme PKH	Bagaimana mekanisme penetapan dan validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Pidie?
4	Pengawasan	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan PKH?
5	Dampak program	Menurut pandangan Dinas Sosial, bagaimana kontribusi PKH terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi fakir miskin?
6	Kendala	Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Pidie?
7	Prinsip keadilan	Bagaimana upaya yang dilakukan agar penyaluran PKH tepat sasaran dan berkeadilan?

#### Informan: Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Fokus Pertanyaan	Pertanyaan Wawancara
1	Pengalaman pendamping	Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi pendamping PKH dan wilayah dampingan yang ditangani?
2	Proses pendampingan	Bagaimana proses pendampingan yang dilakukan kepada KPM PKH?
3	P2K2	Bagaimana pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di lapangan?
4	Perubahan KPM	Perubahan apa saja yang terlihat pada KPM setelah menerima PKH dan pendampingan?

5	Kendala lapangan	Kendala apa yang sering dihadapi pendamping dalam menjalankan tugas?
6	Respons KPM	Bagaimana respons KPM terhadap pendampingan dan arahan yang diberikan?
7	Kemandirian ekonomi	Menurut Bapak/Ibu, apakah PKH mendorong KPM untuk lebih mandiri secara ekonomi? Mengapa?
8	Nilai-nilai Islam	Nilai-nilai apa saja yang terlihat dalam pelaksanaan PKH, seperti keadilan atau kepedulian sosial?

### **Informan: Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH**

No	Fokus Pertanyaan	Pertanyaan Wawancara
1	Lama penerimaan	Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi penerima bantuan PKH?
2	Jenis bantuan	Bantuan apa saja yang diterima melalui PKH dan bagaimana proses penerimaannya?
3	Pemanfaatan bantuan	Bagaimana bantuan PKH membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari?
4	Perubahan ekonomi	Apakah terdapat perubahan kondisi ekonomi keluarga setelah menerima PKH? Tolong jelaskan.
5	Peran pendamping	Bagaimana peran pendamping PKH dalam membantu Bapak/Ibu?
6	P2K2	Apakah Bapak/Ibu mengikuti kegiatan P2K2? Apa manfaat yang dirasakan?
7	Kemandirian	Apakah bantuan PKH mendorong Bapak/Ibu untuk lebih berusaha mandiri secara ekonomi? Mengapa?
8	Nilai Islam	Nilai-nilai apa yang Bapak/Ibu rasakan dalam pelaksanaan PKH, seperti keadilan atau tolong-menolong?

**Informan: Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Yang Telah di Keluarkan**

<b>No</b>	<b>Aspek yang Diteliti</b>	<b>Pertanyaan Wawancara</b>	<b>Tujuan Pertanyaan</b>
1	Riwayat Penerimaan PKH	Ibu mulai menerima bantuan PKH sejak kapan?	Mengetahui awal periode penerimaan bantuan oleh informan.
2		Berapa lama Ibu menerima bantuan PKH?	Mengidentifikasi durasi penerimaan bantuan.
3	Status Kepesertaan	Apa alasan Ibu tidak lagi menerima bantuan PKH?	Mengetahui faktor perubahan status kepesertaan.
4		Apa yang Ibu rasakan ketika tidak lagi menerima bantuan PKH?	Menggali respons emosional dan sosial setelah tidak menerima bantuan.
5	Kondisi Ekonomi Pasca PKH	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga Ibu saat ini setelah tidak lagi menerima PKH?	Menilai kondisi ekonomi keluarga pasca penghentian bantuan.
6	Persepsi terhadap PKH	Menurut Ibu, apakah PKH membantu masyarakat?	Menggali pandangan informan mengenai manfaat program bagi masyarakat miskin.

## Lampiran 2 Transkrip Wawancara

### 1. Kabid PKH dinsos (Irwansyah putra)

1. Bagaimana gambaran umum kondisi fakir miskin di Kabupaten Pidie berdasarkan data dan pengamatan dinas sosial? Jadi gambaran umum kondisi fakir miskin di Kabupaten Pidie Itu sulit digambarkan, gimana menggambarkan kemiskinan secara realistik Tapi yang jelas kemiskinan itu punya angka, punya angka kemiskinan yang disediakan oleh BPS Jadi itu dari tahun ke tahun adalah penurunan yang agak kecil Kalau sekarang kalau tidak salah itu sekitar 17,8% Itu sudah turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Tapi kalau kita lihat dari angkanya 17% Jumlah penduduknya 450 ribu penduduk Pidie itu kalo di kali hasilnya yaitu 76 ribu Tapi hari ini masyarakat miskin banyak sekali. Tapi dengar-dengar PKH yang tahun terbaru 32 ribu kan? 38 ribu, itu KK bukan jiwa kalo sembako 52 ribu, kalo Yang penerima PBI Bahkan 340 ribu jiwa
2. Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Pidie dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)? PKH itu kan program bantuan bersyarat Artinya keluarga yang mendapat program PKH itu harus ada seluruh memenuhi syarat, syarat pertama pasti miskin Miskin Kalau sekarang dia dilihatnya dari desilnya 1-4, 1-4 desil itu layak dapat PKH bagi mereka yang punya syarat, yang memenuhi syarat. udah punya ibu hamil, syaratnya itu dia punya ibu hamil, atau dia punya bayi, atau dia punya balita, atau anaknya sekolah, atau ada alansia, atau ada anak yang ada anggota keluarga yang disabilitas, itu komponen, komponen pembiayaan PKH.
3. Bagaimana mekanisme penetapan dan validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Pidie? PKH itu kan, tadi saya bilang, yaitu bantuan bersyarat yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Orangnya diperintahkan oleh Kementerian Sosial, kemudian bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial, kemudian langsung ke rekening yang bersangkutan, LPM namanya, LPM Penerima Pendapatan. Kemudian didampingi oleh pendampingnya, pendamping PKH, supaya dia terarah penggunaan dananya. Kemudian syarat selanjutnya tadi itu yaitu ibu hamil, syaratnya wajib periksa. Apakah dia benar benar hamil atau tidak, Kemudian dia punya anak sekolah, anak sekolahnya wajib terdaftar. Kalau tidak ada sekolah, itu tidak bersyarat. Jadi ini tugas pendamping Inilah yang mengawal mereka. Yang validasi, Kementerian. Data dari Kementerian. Kemudian yang mengvalidasi sekarang kita juga ada masyarakat. Ada dinas Sosial yang bisa validasi. Namanya ada program sanggah. Orang kaya ternyata desilnya rendah. Dinsos mevalidasi lebih tinggi, dia tidak layak. Kita laporkan ke Kementerian Sosial. Ada orang yang miskin, tapi desilnya tinggi, tidak layak. Seharusnya Dia layak dapat, tapi tidak bisa karena desilnya tinggi, jadi bisa disanggah.

4. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan PKH?

PKH itu diberikan kan 3 bulan sekali, atau 2 bulan sekali. Tergantung momennya Itu pendampingannya dilakukan oleh pendamping program PKH. Namanya SDM PKH. Itu yang intensif mendampingi mereka. Dia kawal dari proses dia dapat, kemudian dia kunjungi rumahnya, melakukan pertemuan juga. Sehingga uangnya tersalur. Yang paling utama itu pendamping. Bukan yang lain. Berarti Pak, dalam 3 bulan itu dapat bantuannya kira-kira berapa Pak? Bervariasi. Beda keluarga, beda bantuannya. Yang cuma punya anak sekolah. Ada keluarga yang dia hamil, punya anak balita. Ada keluarga yang dia hamil, punya anak paralita.

Punya anak sekolah. Punya lansia di rumahnya lagi. Berarti itu semakin banyak bantuannya? Banyak komponen. Tapi kalau anak sekolah, dihitung satu. Misalnya anak sekolah yang SD ada 3. Dihitung satu. Jadi kalau satu SD, satu SMP itu dihitung. Berarti kalau masa sekolah itu sampai SMA aja? Sampai SMA. Kuliah itu nggak dihitung lagi? Nggak dihitung.

5. Menurut pandangan Dinas Sosial, bagaimana kontribusi PKH terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi fakir miskin?

Kalau kita lihat secara angka, kalau kita bilang meningkat, walaupun kita tidak berani bilang meningkat, karena kan yang jelas, peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan itu nggak bisa dari satu posisi. Nggak bisa dari satu dinas saja. Semua dinas terlibat. Semua dinas dan ekonomi itu harus ikut ambil bagian peningkatan. Jadi kita tidak bisa mengklaim dengan PKH keluarga sudah meningkat. Yang jelas, dengan bantuan PKH, sangat membantu keluarga yang miskin.

6. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Pidie?

Secara umum nggak ada kendala. Karena pendataan, penyaluran, sudah ditangani oleh kementerian. Sebenarnya Yang bermasalah bukan kendala, banyak orang-orang miskin yang belum masuk.

Yang kita lihat desilnya, desil 1,2,3,4, punya komponen tapi dia belum dapat. Itu bukan kendala sebenarnya tapi Permasalahan. kendala mereka yang dapat, disalurkan. Berarti cuma permasalahannya saja, Pak. Yaitu belum dapat.

7. Bagaimana upaya yang dilakukan agar penyaluran PKH tepat sasaran dan berkeadilan?

Upaya yang kita lakukan dan juga kementerian lakukan data yang diambil itu hasil suruti. Untuk tahun 2026, data itu digabung dari data kemiskinan ekstrim di TNP2K. Kemudian data dari dinas kementerian sosial, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian dari BPS Resosen. Tiga data ini digabung dianalisis, diolah, jadilah desil. Dari sisi itu, sudah berkeadilan. Berarti kita tidak melihat siapa dia. Kalau dia desilnya di bawah lima, dapat bantuan. Desilnya di bawah empat, layak dapat PKH dan sebagainya. Desil lima, tidak layak dapat sembako, Banyak orang yang dapat PKH, dapat sembako. Yang tidak ada, yang miskin, tapi enggak dapat. Desilnya tinggi. Hasil-hasil dari pemeretaan ini. Tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan ini. Nah, pemerintah kasih peluang untuk pembaharuan data. Pembaharuan data, nanti di SOP ulang, nanti desilnya bisa turun. Memang dia betul betul miskin. Tapi kalau dia nanti, memang dia punya aset kok. Kelihatannya dia miskin. Tapi dia punya aset. Dia punya anak. Desilnya dia enggak turun. Setelah desilnya turun, itu namanya pembaharuan data. Usul pembaharuan. Setelah pembaharuan data dilakukan, desilnya itu, nanti dia usul pembaharuan bantuannya. Dia lihat, dia layak dapat apa, Ya, usul pembaharuan data. Dia lihat, dia layak dapat sembako. Usul juga untuk dapat sembako. Itu upaya untuk membuat keberkadilan. Masyarakat yang ternyata dia orang kaya, tapi desilnya rendah, dapat bantuannya. Kalau kita lihat kenyataannya, tidak layak. Nanti buat pembaharuan, Kita ingatkan, keberkadilan itu. Itu proses saja. Masyarakat kadang-kadang tidak sabar dengan proses. Itu yang dilakukan pemerintah sekarang. Namanya data terpadu, data tunggal sosial ekonomi nasional.

## **2. Kepala Seksi Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial (Adiawan)**

1. Bagaimana Bapak melihat kondisi fakir miskin di Kabupaten Pidie saat ini?

Jika kita berbicara tentang kemiskinan, tentu tidak cukup hanya dilihat dari kondisi visual di lapangan. Secara resmi, kondisi fakir miskin di Kabupaten Pidie dapat dilihat melalui data Badan Pusat Statistik. Berdasarkan data tersebut, angka kemiskinan di Pidie menunjukkan tren penurunan, meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan. Saat ini angkanya berada di kisaran 17–18 persen. Namun demikian, jika angka tersebut dikonversi dengan jumlah penduduk, maka jumlah masyarakat miskin masih tergolong besar. Inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial.

2. Apa peran Dinas Sosial Kabupaten Pidie dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)?

Peran Dinas Sosial lebih kepada fungsi koordinasi dan fasilitasi. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial. Namun di tingkat daerah, kami memastikan program ini berjalan sesuai ketentuan, terutama melalui pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, kami juga memantau pelaksanaan di lapangan serta menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait PKH.

3. Bagaimana mekanisme penetapan penerima PKH di Kabupaten Pidie?

Penetapan penerima PKH dilakukan oleh Kementerian Sosial berdasarkan data terpadu nasional. Data tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam desil kesejahteraan. Keluarga yang berada pada desil 1 sampai 4 dan memiliki komponen PKH, seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas, berhak menerima bantuan. Di tingkat daerah,

Dinas Sosial bersama pendamping PKH berperan dalam melakukan verifikasi lapangan serta mengusulkan sanggahan atau pembaruan data jika ditemukan ketidaksesuaian.

4. Bagaimana pengawasan terhadap penyaluran bantuan PKH?

Pengawasan dilakukan secara berlapis. Penyaluran bantuan PKH langsung masuk ke rekening penerima, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan. Pendamping PKH memiliki peran yang sangat penting karena mereka yang langsung berinteraksi dengan KPM. Pendamping memastikan bahwa bantuan diterima, dimanfaatkan sesuai tujuan, serta kewajiban penerima PKH dipenuhi, seperti kehadiran anak di sekolah dan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil.

5. Menurut Bapak, sejauh mana PKH berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin?

PKH tidak bisa dilihat sebagai satu-satunya faktor peningkatan kesejahteraan. Namun, bantuan ini sangat membantu dalam meringankan beban pengeluaran keluarga miskin, terutama untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya PKH, keluarga miskin setidaknya memiliki jaring pengaman sosial agar tidak semakin terpuruk secara ekonomi.

6. Apa kendala utama dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Pidie?

Secara teknis, pelaksanaan PKH berjalan cukup baik. Namun, permasalahan yang sering muncul adalah masih adanya masyarakat miskin yang belum terakomodir sebagai penerima bantuan. Hal ini umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian data, di mana kondisi di lapangan tidak selalu sejalan dengan hasil pemetaan desil kesejahteraan.

7. Upaya apa yang dilakukan agar penyaluran PKH lebih tepat sasaran?

Pemerintah terus melakukan pembaruan dan integrasi data melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Masyarakat juga diberikan ruang untuk mengajukan sanggahan dan pembaruan data jika merasa layak menerima bantuan. Proses ini memang membutuhkan waktu, namun bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

### **3. Pendamping PKH (Mahrizal)**

1. Jadi pertanyaan pertama, sejak kapan bapak menjadi pendamping PKH dan wilayah dampingan yang ditangani?

Saya 2018 semua jadi pendamping PKH kebetulan wilayah dampingan itu berpindah-pindah karena awalnya di Padang Tiji adalah sempat 2 tahun selanjutnya di Pidie, selanjutnya di Kota Sigli untuk pendampingan sendiri dibagi beberapa desa untuk sekarang saya di Blang Pasch, Benteng, Meunasah Peukan Pidie dan tanjong krueng.

2. Bagaimana proses pendampingan yang dilakukan kepada KPM PKH?

Proses pendampingan untuk KPM PKH ada beberapa tahapan yang salah satunya melalui verifikasi kebijakan karena memang penerima PKH itu ada beberapa komponen termasuk anak sekolah balita dan seterusnya kalau di anak sekolah kita validasi apa komitmen mereka masuk sekolah atau kehadiran dan segala macam dan pendampingan lain yang mengikuti advokasi misalnya kalau ada persoalan-persoalan sosial atau masalah-masalah sosial yang terjadi di penerima PKH itu sendiri dan memberikan P2K2 ya itu bagian dari proses pendampingan.

3. Bagaimana pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 di lapangan?

Peningkatan untuk P2K2 ketika ada beberapa kali kami laksanakan masyarakat pada prinsipnya antusias cuman kadang-kadang materi-materi P2K2 itu sendiri kadang ada yang tidak seberapa sesuai dengan sosial dan budaya yang ada di Pidie atau di Aceh karena materi P2K2 dibuat secara menyeluruh berlaku untuk nasional tapi pada prinsipnya masyarakat ketika kita buat P2K2 itu antusia

4. Perubahan apa saja yang terlihat pada KPM setelah menerima PKH dan pendampingan?

Perubahan yang terlihat idealnya ya atau secara teori memang perubahan yang harusnya terlihat ada peningkatan kesejahteraan tapi itu kan masih butuh waktu yang lama agar ada peningkatan kesejahteraan namun untuk harapan dari yang dimaksud itu sendiri masih cukup sedikit dari penerima PKH itu yang memang punya inisiatif untuk keluar dari PKH itu mungkin kita bisa jadikan sebagai indikasi atau indikatornya bahwa itu yang terlihat nah di lain hal yang terlihat untuk penerima PKH ya pasti mereka senang ketika menerima dan ketika memang ada terkendala ketika tidak menerima itu mungkin juga masyarakat kecewa namun masyarakat sendiri untuk bantuan PKH ini ada beberapa hal yang memang pasti yang terlihat ya misalnya salah satunya masyarakat lebih antusias ke yang balita ke posyandu untuk komponen yang dari penerima PKH seperti anak sekolah mereka sudah bisa memastikan punya pakaian yang layak atau perlengkapan sekolah yang layak yang di dapat mungkin perubahan itu yang memang betul terlihat.

5. Kendala apa saja yang sering dihadapi pendamping dalam menjalankan tugas?

kendala yang sering dihadapi dalam menjalankan tugas yaitu kendalanya ketika memang ada ketidaksesuaian data itu yang pertama yang kedua

kendala ketika memang data yang masuk dari dari desa dari desa usulan dari desa untuk calon penerima PKH untuk masuk data BPNT itu tidak melalui proses yang ketat karena yang cukup menjadi kendala pendamping adalah untuk menggali informasi kepada KPM baik latar belakang atau tingkat pendapatan atau segala macam itu cukup keterbatasan untuk pendamping untuk dapat menggali informasi tersebut informasi tersebut pihak desa yang lebih mudah dapat

6. Bagaimana respon KPM terhadap pendampingan dan arahan yang diberikan?

respon KPM baik untuk arahan yang diberikan dan pendampingan yang diberikan karena KPM sendiri memang cukup terikat dengan dengan bantuan PKH ya misalnya kami mendorong KPM untuk ke posyandu KPM merespon dengan baik misalnya kami mendorong tingkat kehadiran anak KPM untuk sekolah itu diatas 90% KPM juga melaksanakannya dengan baik ketika pelaksanaan kegiatan P2K2 ketika diundang hampir 95% yang diundang hadir ke desa.

7. menurut bapak apakah PKH mendorong KPM untuk lebih mandiri secara ekonomi

iya PKH mendorong KPM untuk mandiri secara ekonomi kenapa? karena memang PKH sendiri ini adalah untuk dana yang diberikan untuk ke masyarakat masyarakat kurang mampu tapi untuk peningkatan ekonomi ya mungkin kita saya tidak bisa mengatakan untuk peningkatan ekonomi dalam jangka pendek, tapi peningkatan untuk ekonomi jangka panjang itu PKH mungkin bisa menjawab, kenapa? karena salah satu komponen dari PKH itu anak sekolah artinya di program PKH ini memastikan anak-anak penerima manfaat ini agar melanjutkan sekolah seperti yang kita tahu,

karena pendidikan ini adalah salah satu senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan.

8. nilai-nilai apa saja yang terlihat dalam pelaksanaan PKH, contohnya itu seperti keadilan atau kepedulian sosial?

baik nilai yang terdapat dalam pelaksanaan PKH yang salah satunya adalah nilai sosial, kenapa? karena memang kami mengingatkan penerima PKH atau keluarga penerima harapan untuk menguatkan nilai-nilai sosial, contohnya misalnya anak penerima manfaat adalah anak bersama itu mereka saling mengawasi, misalnya ada yang nggak pergi ngaji mereka ngelaporin ke ibunya jadi kalau misalnya ada yang bolos sekolah, mereka juga misalnya jumpa dengan anak kawannya mereka melaporkan itu yang pertama, yang kedua juga bisa membangun kekompakan di masyarakat itu sendiri nah, memang berpecahan juga kadang terjadi juga di penerima PKH, memang ada yang dianggap oleh masyarakat itu nggak layak sebagai penerima PKH mungkin itu.

#### **4. KPM 1 (Iryani)**

1. sejak kapan Ibu menjadi penerima bantuan PKH? 2018
2. Bantuan apa saja yang Ibu terima melalui PKH dan bagaimana proses penerimaannya? Bantuan berupa uang tunai melalui ATM Ada sembako gitu Bu? Sembako ada, Berarti bantuan tunai itu dikasihnya per 3 bulan? Iya, per 3 bulan Kalau yang pertama berupa sembako ya Yang berupa misalnya minyak makan, ada telur Yang pertama-pertama itu Kalau uang tunai itu berapa jumlahnya? Kalau uang tunai 1 bulan Rp.200.000 Berarti dikali 3 bulan Rp.600.000 Pakai ATMnya

3. Selanjutnya bagaimana bantuan PKH membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari? Alhamdulillah membantu, sangat membantu
4. Apakah terdapat perubahan kondisi ekonomi keluarga setelah menerima PKH? Kalau tentang ekonomi keluarga, alhamdulillah kadang-kadang meningkat ya Kadang-kadang ada biasa-biasa saja
5. Bagaimana peran pendamping PKH dalam membantu Ibu? Peran pendamping cuma orang itu datang mendata saja Mendata saja
6. Apakah Ibu mengikuti kegiatan P2K2? Apa manfaat yang dirasakan? Penjelasan dari orang PKH ya Insya Allah kami ada ikut
7. Apakah bantuan PKH mendorong Ibu untuk lebih berusaha secara mandiri? Kenapa? Insya Allah ya kalau bisa, maulah berusaha mandiri ya
8. nilai-nilai apa yang Ibu rasakan dalam pelaksanaan PKH? Contohnya seperti kadilan atau tolok-nolong? Saling tolong-menolong Tentang manfaat dari PKH Dari PKH nilai saling menolong, alhamdulillah ada

### **KPM 2 (Samsiar)**

1. Sejak kapan Ibu menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)?  
Saya mulai menerima bantuan PKH sejak anak saya masih sekolah, waktu itu anak masih duduk di kelas 4 SD. Sejak saat itu saya terdaftar sebagai penerima bantuan sampai sekarang. Tahun berapa itu, Bu? Kalau dihitung tahunnya saya kurang ingat pasti, tapi sekarang anak saya sudah kelas 3 SMA, jadi sudah cukup lama menerima PKH.
2. Bantuan apa saja yang Ibu terima melalui PKH dan bagaimana proses penerimaannya?

Bantuan yang saya terima berupa sembako, kemudian bantuan untuk uang sekolah anak, serta bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP). Proses penerimaannya biasanya melalui jadwal yang sudah ditentukan dan kami diberitahu sebelumnya.

3. Bagaimana bantuan PKH membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari?

Bantuan PKH itu sangat membantu, terutama untuk biaya sekolah anak. Jadi bantuan tersebut lebih difokuskan untuk kebutuhan pendidikan anak, ya Bu?

Iya, bantuan itu memang digunakan untuk uang sekolah anak, seperti kebutuhan pendidikan dan keperluan sekolah lainnya, jadi bisa meringankan beban keluarga.

4. Apakah terdapat perubahan kondisi ekonomi keluarga setelah menerima bantuan PKH?

Ada perubahan, walaupun tidak terlalu besar. Setidaknya dengan adanya PKH, beban ekonomi keluarga jadi lebih ringan, terutama untuk urusan sekolah anak.

5. Bagaimana peran pendamping PKH dalam membantu Ibu selama menjadi penerima bantuan?

Selama ini kami tidak pernah dibantu secara langsung oleh pendamping. Pendamping biasanya hanya ada saat rapat saja. Jadi peran pendamping lebih terlihat saat kegiatan rapat, ya Bu? Iya, biasanya hanya saat rapat atau pertemuan tertentu saja, dan itu pun tidak sering.

6. Apakah Ibu mengikuti kegiatan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga)?

P2K2 itu yang rapat seperti kemarin, ya?

Iya, Bu. Lalu apa manfaat yang Ibu rasakan dari kegiatan tersebut?

Saya kurang memahami secara jelas manfaatnya, tapi dari rapat itu setidaknya jadi lebih tahu dan lebih paham sedikit tentang program PKH dan aturan-aturannya.

Apakah bantuan PKH mendorong Ibu untuk lebih berusaha mandiri secara ekonomi?

7. Iya, dengan adanya bantuan PKH saya jadi lebih termotivasi untuk tetap berusaha dan tidak hanya bergantung pada bantuan saja.
8. Nilai-nilai apa yang Ibu rasakan dalam pelaksanaan PKH, misalnya nilai tolong-menolong atau keadilan? Setelah menerima PKH, apakah Ibu terdorong untuk membantu orang lain yang membutuhkan?

Iya, saya merasakan adanya nilai tolong-menolong. Setelah menerima bantuan, saya juga merasa lebih peduli dan ada keinginan untuk membantu keluarga atau tetangga yang membutuhkan jika saya mampu.

### **KPM 3 (kak Nita)**

1. Sejak kapan kakak menjadi penerima bantuan PKH? Akhir 2024.
2. Nah, bantuan apa saja yang kakak diterima melalui PKH dan bagaimana proses penerimaannya? Kakak pertama dapat di kantor pos, habis itu dapatnya melalui KKS Kartu Keluarga Sejahtera. Situ ada dapat duit PKH, penebalan, kayak BLT kesra dapat. Itu bantuannya itu kak, apa uang tunai? Enggak, uang tunai, tapi di melalui ATM. Melalui ATM, sembako ada juga? Sembako ada juga, tapi kak, sembako baru dua kali dapat.
3. Selanjutnya bagaimana bantuan PKH membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari? Untuk bantu sekolah anak, bayar uang bulanan sekolah anak, beli yang keperluan anak.
4. Apakah terdapat perubahan kondisi ekonomi keluarga setelah menerima PKH? Ya, perubahlah sikit, meringankan untuk biaya pendidikan anak.

5. Bagaimana peran pendamping PKH dalam membantu kakak? Bagus lah untuk kita minta solusi, misal kenapa belum cair
6. Apakah kakak mengikuti kegiatan P2K2? Apa manfaat yang dirasakan? Sudah diikuti kemarin kan, misal sharing sharing cerita, abis itu orang yang sudah lama ikut PKH, sembako, dikeluarkan. Apa mau keluar mandiri, apa mau keluar dari sana langsung.
7. Apakah bantuan PKH mendorong kakak untuk lebih berusaha mandiri secara ekonomi? Ya, mendorong. Kita kan tidak mungkin jadi miskin selalu, mau berubah juga nasib.
8. Yang terakhir nih kak, nilai-nilai apa saja yang kakak rasakan dalam pelaksanaan PKH? Contohnya keadilan atau tolong-menolong? Ya, tolong-menolong lah, bisa membantu orang dengan mendapatkan PKH, bisa meringankan, kita juga bisa lihat tetangga lah.

#### **KPM 4 (Yusliana)**

1. Sejak kapan Ibu menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)?  
Saya mulai menerima bantuan PKH sejak tahun 2017 dan sampai sekarang masih terdaftar sebagai penerima.
2. Bantuan apa saja yang Ibu terima melalui PKH dan bagaimana proses penerimaannya?  
Bantuan yang saya terima berupa uang tunai yang disalurkan melalui kartu ATM Bank Syariah Indonesia (BSI).
3. Bagaimana bantuan PKH membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari?  
Kalau untuk memenuhi kebutuhan keluarga sepenuhnya belum cukup, tapi tetap membantu. Saya hanya menerima sekitar Rp300.000 dan itu pun

untuk anak, dicairkan tiga bulan sekali. Jumlah tersebut tentu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari keluarga, tapi setidaknya bisa meringankan.

4. Apakah terdapat perubahan kondisi ekonomi keluarga setelah menerima bantuan PKH?

Tidak ada perubahan yang berarti, keadaannya masih seperti biasa. Bantuan Rp300.000 itu tidak bisa membuat kondisi ekonomi berubah. Anak keempat tidak pernah menerima, yang menerima hanya anak kelima. Per orang yang dihitung hanya sekitar Rp225.000. Untuk sembako memang ada bantuan sekitar Rp600.000 per tiga bulan, artinya sekitar Rp200.000 per bulan.

5. Bagaimana peran pendamping PKH dalam membantu Ibu sebagai penerima bantuan?

Pendamping PKH membantu dengan cara menjelaskan tentang PKH dan membantu berbicara kalau ada hal-hal yang kurang kami pahami terkait bantuan.

6. Apakah Ibu mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)? Apa manfaat yang Ibu rasakan?

Iya, saya mengikuti kegiatan P2K2. Dalam kegiatan itu kami diberi penjelasan oleh pendamping tentang keluarga, anak sekolah, dan cara menggunakan bantuan PKH. Manfaatnya ada, kami jadi lebih tahu informasi tentang PKH, walaupun untuk kondisi ekonomi belum terlalu berdampak besar.

7. Apakah bantuan PKH mendorong Ibu untuk lebih berusaha mandiri secara ekonomi?

Kalau untuk mendorong supaya lebih mandiri secara ekonomi, menurut

saya tidak ada, karena bantuan yang diterima hanya sekitar Rp300.000, jadi belum bisa dijadikan modal atau dorongan untuk usaha.

8. Nilai-nilai apa yang Ibu rasakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan?

Nilai keadilan dan tolong-menolong saya rasakan dalam pelaksanaan PKH, karena bantuan ini ditujukan untuk saling membantu sesama yang memang membutuhkan.

### **KPM 5 (Suriyati)**

1. Sejak kapan Ibu menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)?

Saya kurang ingat tahunnya, tapi sudah cukup lama dan sampai sekarang masih menerima bantuan PKH.

2. Bantuan apa saja yang Ibu terima melalui PKH dan bagaimana proses penerimaannya?

Bantuan yang saya terima berupa sembako seperti beras dan juga bantuan uang tunai. Biasanya bantuan uang itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan beras diterima secara berkala sesuai jadwal.

3. Bagaimana bantuan PKH membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari?

Bantuan PKH memang sangat membantu. Uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan makan, sekolah anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Walaupun tidak besar, tapi sangat berarti untuk kondisi ekonomi kami.

4. Apakah terdapat perubahan kondisi ekonomi keluarga setelah menerima bantuan PKH?

Kalau perubahan besar mungkin tidak ada, karena jumlah bantuannya

tidak terlalu besar. Tapi setidaknya bisa meringankan beban. Untuk makan, sekolah anak, dan kebutuhan sehari-hari bisa terbantu.

5. Bagaimana peran pendamping PKH dalam membantu Ibu sebagai penerima bantuan?

Peran pendamping PKH cukup baik. Pendamping sering memberi arahan dan membantu menjelaskan terkait bantuan PKH. Jadi kami merasa terbantu dan tidak bingung.

6. Apakah Ibu mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)? Apa manfaat yang Ibu rasakan?

Iya, saya mengikuti kegiatan P2K2 yang diadakan oleh pendamping PKH. Dalam kegiatan itu kami sering diberi penjelasan tentang cara mengatur keuangan keluarga, pentingnya pendidikan anak, kesehatan, dan cara mengurus kebutuhan rumah tangga dengan lebih baik. Manfaatnya cukup terasa, karena kami jadi lebih paham bagaimana menggunakan bantuan PKH dengan bijak dan lebih memperhatikan pendidikan serta kesehatan anak.

7. Apakah bantuan PKH mendorong Ibu untuk lebih berusaha mandiri secara ekonomi?

Kadang-kadang masih kurang untuk mendorong benar-benar mandiri, tapi bantuan ini tetap membantu kami untuk bertahan. Kalau ada kesempatan, kami juga berusaha sendiri semampunya.

8. Nilai-nilai apa yang Ibu rasakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan?

Nilai yang paling terasa adalah tolong-menolong. Kami merasa sangat terbantu dan bersyukur. Dari segi pembagian juga terasa adil, karena bantuan diberikan kepada yang memang membutuhkan.

## KPM 6 (Cut Sulastri)

1. Jadi ibu, gini ibu. Jadi ada pertanyaan, ada delapan nih. Jadi pertanyaan pertama tuh, sejak kapan ibu menjadi penerima bantuan PKH? Kalau sejak kapan, kalau detail tahunnya, nggak ingat lagi. Tapi udah lama. Udah lama berarti? Udah lama.
2. Pertanyaan kedua nih, bantuan apa saja yang ibu terima melalui PKH dan bagaimana proses penerimaannya? Kalau yang dari PKH, cuma biaya pendidikan anak aja. Besarannya Rp375.000. Itu dapatnya per 3 bulan. Kalau proses sembako gitu ada, ibu? Kalau sembako ada juga, per 3 bulan juga dibayarnya.
3. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bantuan PKH membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari, ibu? Ya, sangat membantu juga sih
4. Yang keempat, apakah terdapat perubahan kondisi ekonomi keluarga setelah menerima PKH? Ya, kalau dibilang perubahan, ya ada juga sih perubahannya.
5. Yang kelima, bagaimana peran pendamping PKH dalam membantu ibu? Peran pendamping ya? Perannya. Bagaimana ya perannya? Karena pendampingnya jarang-jarang ngumpul. Paling tidak per tahun sekali. Tapi mungkin kemarin ada pertemuan sekali, katanya ini setiap bulan mau dibuat rapat, rapat PKH gitu kan.
6. Apakah Ibu mengikuti kegiatan P2K2? Apa manfaat yang dirasakan? Kalau kegiatan P2K2, saya pernah ikut, walaupun tidak sering karena jarang ada pertemuan. Dari kegiatan itu, saya dapat pengetahuan tentang cara mengatur keuangan keluarga.
7. Apakah bantuan PKH mendorong ibu untuk lebih berusaha mandiri secara ekonomi? Ya, betul. Ya, betul. Bantuan PKH membuat saya lebih

termotivasi untuk berusaha sendiri karena bantuan ini tidak selamanya, jadi saya tidak ingin terus bergantung pada bantuan.

8. Yang terakhir, nilai-nilai apa saja yang ibu rasakan dalam pelaksanaan PKH? Contohnya seperti keadilan atau tolong menolong? Keadilan, tolong menolong, sama juga.

### **Transkrip Wawancara yg dikeluarkan**

#### **Wawancara dengan Informan 10 (Ibu Nurasih)**

1. Ibu mulai terima PKH sejak kapan?  
Saya mulai terima sekitar tahun 2018. Waktu itu memang kondisi kami susah kali. Suami kerja bangunan, kadang ada kerja, kadang nggak ada. Jadi penghasilan tak tentu.
2. Sampai kapan Ibu terima bantuannya?  
Terakhir tahun 2023. Habis itu sudah nggak terima lagi.
3. Kenapa bisa keluar dari penerima?  
Kata pendamping, ekonomi kami sudah agak mendingan. Sekarang saya sudah jualan kue sama gorengan di rumah. Memang tak besar hasilnya, tapi sudah bisa bantu kebutuhan sehari-hari. Jadi saya dibilang sudah graduasi.
4. Waktu dibilang keluar, apa yang Ibu rasakan?  
Awalnya takut juga, karena uang PKH itu biasa saya pakai untuk kebutuhan sekolah anak. Tapi ya, kalau memang sudah dianggap mampu, saya syukuri saja. Artinya ada perubahan dibanding dulu.
5. Selama terima PKH, terasa manfaatnya?  
Terasa sekali. Untuk beli seragam, buku anak, kadang saya simpan sedikit buat tambah modal jualan. Kalau tak ada PKH dulu, mungkin kami harus sering utang.

6. Menurut Ibu, PKH membantu masyarakat?

Sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang benar-benar kurang mampu. Bantuan ini bisa meringankan kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan pokok. Cuma memang harapannya bantuan itu benar-benar diterima oleh yang masih susah, supaya lebih adil dan tepat.

### **Wawancara dengan Informan 11 (Ibu Rahmi)**

1. Ibu mulai terima PKH kapan?

Saya mulai sekitar tahun 2020. Waktu itu hasil tani kurang bagus, kadang panen gagal. Jadi memang butuh bantuan kali.

2. Berapa lama Ibu terima?

Sekitar tiga tahun. Tahun 2024 sudah tak terima lagi.

3. Apa alasan Ibu dikeluarkan?

Katanya penghasilan suami sudah meningkat, terus anak juga sudah tak masuk komponen yang sama lagi. Jadi data kami berubah.

4. Apa yang Ibu rasakan waktu itu?

Jujur agak kaget, karena sudah terbiasa ada bantuan tiap tahap. Tapi pendamping bilang harus diganti dengan yang lebih susah. Jadi mau tak mau ya terima saja.

5. Sekarang bagaimana kondisi ekonomi keluarga?

Sekarang kami lebih berusaha sendiri. Suami tanam sayur tambahan selain padi, saya bantu jual di depan rumah. Memang tak selalu cukup, tapi sudah belajar atur keuangan pelan-pelan.

6. Menurut Ibu, PKH membantu masyarakat?

Membantu kali, terutama yang memang benar-benar susah. Cuma memang data harus sering dicek, supaya jangan ada yang sudah mampu masih terima bantuan.

### Lampiran 3 Dokumentasi

#### 1. Dokumentasi Bersama Pejabat Dinas Sosial



## 2. Dokumentasi Bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH





### 3. Dokumentasi Bersama Pendamping PKH

